

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--|---------|
| 2.1 Hubungan Tingkat Bunga dan Investasi | 22 |
| 2.2 <i>Demand Inflation</i> | 27 |
| 2.3 <i>Cost Inflation</i> | 28 |
| 2.4 Isoquant..... | 30 |
| 2.5 Teori Klasik Tentang Tingkat Bunga | 36 |
| 2.6 Kerangka Pemikiran | 45 |

DAFTAR GRAFIK

| Grafik | Halaman |
|---|---------|
| 1.1 Perkembangan Realisasi PMDN di Pulau Jawa Tahun 2006 - 2015 | 5 |
| 4.1 Realisasi PMDN di Jawa Tengah Tahun 2000-2016 | 69 |
| 4.2 Tingkat Inflasi di Jawa Tengah Tahun 2000-2016 | 72 |
| 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah Tahun 2000 - 2016 | 73 |
| 4.4 Tingkat Suku Bunga Kredit Investasi Kategori Bank Umum di Jawa Tengah Tahun 2000-2016 | 76 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Halaman |
|---|---------|
| 1. Data Variabel | 103 |
| 2. Data Variabel (Logaritma Natural) | 104 |
| 3. Regresi Linier Berganda | 105 |
| 4. Uji Normalitas | 106 |
| 5. Uji Autokorelasi | 107 |
| 6. Uji Heterokedastisitas | 108 |
| 7. Uji Multikolinearitas dengan Korelasi Parsial..... | 109 |

RINGKASAN

Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri di Jawa Tengah Tahun 2000-2016”. Upaya pembangunan di berbagai sektor perekonomian membutuhkan dana yang besar, tetapi kemampuan pemerintah dalam menyediakan dana tersebut terbatas karena penerimaan pemerintah juga terbatas. Oleh karena itu salah satu kebijakan pemerintah adalah melakukan usaha-usaha agar memperoleh dana pembangunan yaitu melalui investasi. Penelitian ini menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal dalam negeri di Jawa Tengah tahun 2000-2016.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan suku bunga kredit investasi terhadap penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jawa Tengah serta variabel mana yang paling berpengaruh. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan menggunakan data sekunder.

Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan pengujian asumsi klasik, pengujian statistik, dan uji koefisien beta (β). Berdasarkan hasil perhitungan Uji F untuk variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan suku bunga kredit investasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penanaman modal dalam negeri. Secara parsial dengan menggunakan Uji t, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PMDN, variabel tingkat inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PMDN, variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PMDN, variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PMDN, serta variabel suku bunga kredit investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PMDN di Jawa Tengah.

Berdasarkan perhitungan uji koefisien beta (β) dapat diketahui bahwa variabel suku bunga kredit investasi merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap PMDN di Jawa Tengah.

Implikasi dari penelitian ini adalah pembenahan sistem pelayanan perizinan dan penanaman modal diperlukan untuk memperlancar investasi serta perlunya upaya pemerintah dalam mengatur perekonomian melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya untuk mendorong laju perekonomian daerah.

Kata Kunci : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pengeluaran Pemerintah, dan Suku Bunga Kredit Investasi

SUMMARY

The title of this research is “The Analysis of The Factors That Influence The Domestic Capital Investment in Central Java Period 2000-2016”. The effort of development on each one of the economic sectors needs enormous funding. But the ability of the government to provide those fundings is limited because the government revenue is also limited. Therefore, one of the government policies is to make several efforts to get the development fundings which is through investment. This research analyzed the factors that influence the domestic capital investment in Central Java period 2000-2016.

This research has the purpose to find out the influence of economic growth, inflation rate, open unemployment rate, government expenditure, and investment credit interest rate against the domestic capital investment in Central Java and also which variables influence the most. This research uses multiple linear regression method using secondary data.

The analysis method which is used is multiple linear regression with classical assumption test, and beta coefficient test. According to the calculation of F test for the economic growth, inflation rate, unemployment rate, government expenditure and investment credit interest rate altogether influence the domestic capital investment. Partially using t test, economic growth has a positive and insignificant influence against the domestic capital investment, the inflation has a negative and insignificant influence against the domestic capital investment, the open unemployment rate has a negative and insignificant influence against the domestic capital investment, the government expenditure variable has a positive and significant influence against the domestic capital investment, and the investment credit interest rate has a positive and significant effect against the domestic capital investment.

According to the calculation of beta (β) coefficient test, it can be concluded that the investment credit interest rate is the most influencing factor against the domestic capital investment in central java.

The implication of this research is the fixation of the service and licensing system and the capital investment is needed to make the investment flows better and it is important for the government to do an effort in controlling the government through the monetary policy, fiscal policy, and other policies to push the improvement of local economic.

Keyword : Domestic Capital Investment, Economic Growth, Inflation Rate, Open Unemployment Rate, Government Expenditure, and Investment Credit Interest Rate.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi negara-negara berkembang atau yang belum maju seperti Indonesia, perencanaan serta fungsi pemerintah merupakan faktor yang sangat penting terhadap peningkatan pembangunan ekonomi. Banyak orang yang menggambarkan pencapaian cita-cita pembangunan adalah dengan banyaknya pembangunan fisik seperti jalan tol, bandara, gedung-gedung, pembangunan kota-kota besar, dan sebagainya. Padahal, arti pembangunan yang dicita-citakan adalah pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan akan menuju pada kemakmuran, tetapi belum tentu sebaliknya. Pembangunan masyarakat (manusia) merupakan aspek yang utama, sedangkan pembangunan fisik hanyalah bukti bahwa sebagian manusianya makmur. Beberapa ahli mengemukakan bahwa jika ada uang pembangunan lancar, padahal tidak selalu berarti demikian. Banyaknya jalan layang, gedung-gedung bertingkat, dan jembatan bukan berarti masyarakat sudah sejahtera, tapi nyatanya masih ada masyarakat yang menderita. (Afifuddin, 2012)

Untuk mendorong kegiatan sosial ekonomi masyarakat, pemerintah telah menghabiskan banyak dana. Dalam upaya pembangunan jangka panjang di berbagai sektor perekonomian pemerintah memerlukan modal yang besar, tetapi kemampuan pemerintah dalam menyediakan modal tersebut terbatas karena penerimaan pemerintah juga terbatas. Oleh karena itu sebagai salah satu aspek

dalam kebijakan pemerintah, pemerintah perlu melakukan usaha-usaha agar memperoleh lebih banyak dana untuk pembangunan. (Amirudin, 2003)

Usaha pengerahan modal untuk tujuan tersebut dapat dibedakan dalam pengerahan modal dalam negeri dan modal asing. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) yakni bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda baik yang dimiliki negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia untuk diabdikan kepada pembangunan ekonomi nasional. Namun untuk menutup kebutuhan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi hanya dengan penanaman modal dalam negeri saja masih belum tercukupi, oleh karena itu pemerintah harus mencari dana pinjaman dari para investor asing atau dalam hal ini adalah penanaman modal asing (PMA). Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Peraturan mengenai penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing telah ditetapkan dalam undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi baik PMDN maupun PMA di Indonesia jika dilihat berdasarkan lokasi masih didominasi oleh daerah-daerah di Pulau Jawa. Namun investasi di luar Pulau Jawa juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 total investasi di Indonesia yaitu sebesar 3.544.969,42 miliar rupiah, investasi di luar Pulau Jawa dari total investasi atau sebesar 1.615.904,43 miliar rupiah (45,58%) sedangkan Pulau Jawa

jumlah investasinya sebanyak 1.929.064,99 miliar rupiah (54,42%). Kemudian selama tahun 2015 total investasi di Indonesia sebesar 4.100.084,83 miliar rupiah, realisasi investasi di luar Pulau Jawa mengalami pertumbuhan sebesar 19,50 persen menjadi 1.931.064,47 miliar rupiah (47,10%), sedangkan Pulau Jawa hanya tumbuh sebesar 12,44 persen menjadi 2.169.020,36 miliar rupiah (52,90%). Meskipun laju pertumbuhan investasi di luar Pulau lebih tinggi dibandingkan Pulau Jawa, namun realisasi investasi di Pulau Jawa masih dominan.

Berikut data realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di 6 Provinsi di Pulau Jawa :

Tabel 1.1 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di 6 Provinsi di Pulau Jawa tahun 2011-2015 (miliar rupiah)

| Provinsi | Tahun | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| PMA | 1.082.037,20 | 1.378.818,50 | 1.810.783,40 | 1.832.548,20 | 2.066.782,30 |
| 1. DKI Jakarta | 423.531,50 | 385.318,10 | 270.805,40 | 534.927,30 | 484.708,90 |
| 2. Jawa Barat | 337.079,80 | 394.979,90 | 744.586,90 | 779.442,10 | 768.524,80 |
| 3. Jawa Tengah | 15.364,10 | 20.120,90 | 48.525,70 | 55.044,00 | 113.885,30 |
| 4. DI Yogyakarta | 210,7 | 7.963,90 | 3.093,60 | 7.709,00 | 11.932,20 |
| 5. Jawa Timur | 115.186,90 | 215.636,30 | 354.959,90 | 214.106,30 | 347.307,30 |
| 6. Banten | 190.664,20 | 354.799,40 | 388.811,90 | 241.319,50 | 340.423,80 |
| PMDN | 35.214,23 | 48.529,85 | 54.761,09 | 96.516,79 | 102.238,06 |
| 1. DKI Jakarta | 9.256,40 | 8.540,10 | 5.754,50 | 17.811,50 | 15.513,00 |
| 2. Jawa Barat | 11.194,30 | 11.384,00 | 9.006,10 | 18.726,90 | 26.273,00 |
| 3. Jawa Tengah | 775,83 | 1.633,95 | 859,09 | 13.061,19 | 13.890,06 |
| 4. DI Yogyakarta | 1,6 | 334 | 283,8 | 703,9 | 362 |
| 5. Jawa Timur | 9.687,50 | 21.520,30 | 34.848,90 | 38.132,00 | 35.490,00 |
| 6. Banten | 4.298,60 | 5.117,50 | 4.008,70 | 8.081,30 | 10.710,00 |
| Total Investasi | 1.117.251,43 | 1.427.348,35 | 1.865.544,49 | 1.929.064,99 | 2.169.020,36 |

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan peringkat pertama tujuan PMDN di Pulau Jawa dengan total investasi dari tahun 2011-2015

sebanyak 4.581.515,40 miliar rupiah. PMA di Jawa Timur pada tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 65,79 persen menjadi 214.106,3 miliar rupiah. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2014 diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden, yang mana menyebabkan perekonomian menjadi kurang stabil, oleh karena itu minat para investor untuk menanamkan modal berkurang. Sedangkan untuk PMDN, di Jawa Tengah pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 1.420,36 persen menjadi 13.061,19 miliar rupiah. Peningkatan ini disebabkan karena sejak awal kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pemerintah daerah Jawa Tengah melakukan reformasi perizinan yang telah disetujui oleh Presiden. Reformasi tersebut yakni tentang penyederhanaan perizinan serta proses yang satu pintu dengan waktu singkat. Pemerintah mendorong setiap kabupaten/kota untuk menyederhanakan perizinan agar ramah investasi. Karena sebelumnya yang meresahkan investor adalah pemerasan oleh oknum dan proses perizinan yang sulit, hal ini sudah ditanggulangi dan sekarang tidak ada lagi. Tentunya juga dengan diikuti berbagai proyek infrastruktur untuk menarik para investor masuk ke Jawa Tengah.

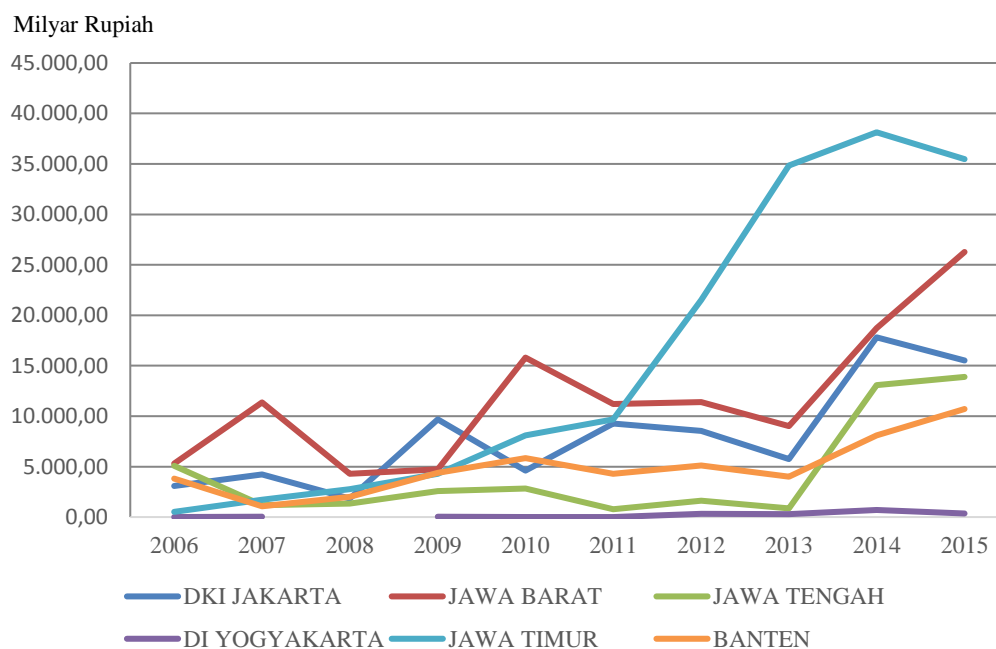
. Laju PMDN di Pulau Jawa dari tahun 2011 sampai 2015 tiap tahunnya tumbuh sebesar 1,57 persen, sedangkan PMA tumbuh sebesar 1,50 persen tiap tahunnya. Menurut Kuncoro (2010) strategi pembiayaan pembangunan yang baik adalah strategi pembiayaan yang mandiri, artinya dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan menggunakan dana dari dalam negeri. Baik lewat mobilisasi tabungan domestik, perpajakan, maupun gerakan swadana. Sedangkan

dana yang berasal dari luar negeri hanya bersifat melengkapi bukan sebagai tumpuan utama. Dapat diketahui dari tabel tersebut bahwa meskipun di Pulau Jawa realisasi PMDN masih lebih kecil daripada PMA. Meskipun dana luar negeri masih lebih dominan dalam pembiayaan pembangunan, namun jika dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan realisasi PMDN lebih besar daripada PMA. Hal ini berarti terdapat peningkatan dana investasi yang berasal dari dalam negeri.

Investasi dapat masuk ke suatu wilayah apabila para investor merasa aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan investasi tersebut. Kegiatan investasi di suatu daerah salah satunya ditentukan oleh potensi ekonomi dan iklim usaha yang dimilikinya.

Berikut data realisasi penanaman modal dalam negeri di Pulau Jawa Tahun

2006-2015:



Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Grafik 1.1 Perkembangan Realisasi PMDN di Pulau Jawa Tahun 2006-2015
(Miliar Rupiah)

Berdasarkan Grafik 1.1 lokasi trend investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek yang terbesar adalah Jawa Timur dengan total investasi 157.073,69 triliun, Jawa Barat 118.060,67 triliun, DKI Jakarta 80.310,83 triliun, Banten 49.323,20 triliun, Jawa Tengah 43.211,29 triliun dan DI Yogyakarta 1.781,67 triliun. Meskipun di Jawa Tengah belum sebanyak provinsi lainnya, namun realisasi penanaman dalam negeri di Jawa Tengah semakin meningkat, selain itu tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah juga terus mengalami penurunan tiap tahunnya dari tahun 2010 sebesar 6,21 turun menjadi 4,63 pada tahun 2016.

Berikut data tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa tahun 2010-2016.

Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Pulau Jawa Tahun 2010-2016 (Persen)

| Tahun | DKI Jakarta | Jawa Barat | Jawa Tengah | DI Yogyakarta | Jawa Timur | Banten |
|-------|-------------|------------|-------------|---------------|------------|--------|
| 2010 | 11,05 | 10,33 | 6,21 | 5,68 | 4,25 | 13,68 |
| 2011 | 11,69 | 9,96 | 5,93 | 4,39 | 5,38 | 13,74 |
| 2012 | 9,67 | 9,08 | 5,63 | 3,90 | 4,11 | 9,94 |
| 2013 | 8,63 | 9,16 | 6,02 | 3,24 | 4,30 | 9,54 |
| 2014 | 8,47 | 8,45 | 6,02 | 3,33 | 4,19 | 9,07 |
| 2015 | 7,23 | 8,72 | 4,99 | 4,07 | 4,47 | 5,55 |
| 2016 | 6,12 | 8,89 | 4,63 | 2,72 | 4,21 | 8,92 |

Sumber : Data Badan Pusat Statistik (BPS), Tahun 2017

Dari data Grafik 1.2 Tingkat pengangguran terbuka 6 provinsi di Pulau Jawa, Jawa Tengah menempati urutan ke 4 setelah Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Namun berdasarkan data tingkat pengangguran terbuka 6 provinsi di Pulau Jawa, rata-rata pengangguran terbuka di Jawa Timur yaitu 3,86 persen, Jawa Barat 8,07 persen, dan DKI Jakarta 7,91, sedangkan Jawa Tengah lebih rendah yaitu 5,63. Tingkat pengangguran Jawa Tengah lebih rendah jika dibandingkan dengan

Jawa Barat dan DKI Jakarta. Ini berarti meskipun realisasi penanaman modal dalam negeri di Jawa Tengah masih lebih sedikit dibandingkan Jawa Barat dan DKI Jakarta yang realisasi PMDNnya lebih tinggi, namun penyerapan tenaga kerjanya lebih banyak. Hal ini juga dibuktikan dengan tingkat pengangguran terbuka yang semakin menurun setiap tahunnya. Menurut data BKPM total investasi sejak 2013 hingga semester I tahun 2017 terdapat sebanyak 5.583 perusahaan baru dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 541.520 orang. Tenaga kerja tersebut tersebar di sejumlah daerah dengan terbanyak yakni di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar dan Purbalingga. Untuk jumlah tenaga kerja sebagian besar jelas dari dalam negeri, ada sebanyak 537.748 dan tenaga kerja asing berjumlah 3.772 orang.

Berikut data realisasi penanaman modal dalam negeri di Jawa Tengah :

Tabel 1.3 Realisasi dan Perkembangan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Jawa Tengah 2011–2015

| Tahun | Realisasi PMDN (Miliar Rupiah) | Pertumbuhan (Persen) | Realisasi PMA (Miliar Rupiah) | Pertumbuhan (Persen) |
|--|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 2011 | 775,83 | -72,54 | 15.364,10 | 43,50 |
| 2012 | 1.633,95 | 110,61 | 20.120,90 | 30,96 |
| 2013 | 859,09 | -47,42 | 48.525,70 | 141,17 |
| 2014 | 13.061,19 | 1.420,36 | 55.044,00 | 13,43 |
| 2015 | 13.890,06 | 6,35 | 113.885,30 | 106,90 |
| Total | 30.220,12 | | 252.940,00 | |
| Total Investasi : 283.160,12 Miliar Rupiah | | | | |

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Melihat perkembangan dari penanaman modal di Jawa Tengah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Tabel 1.3 menunjukan pada tahun 2011 tercatat sebesar 775,83 miliar arus modal dalam negeri yang masuk ke Jawa

Tengah, nilai realisasi pada tahun ini mengalami penurunan 72,54 persen dibandingkan tahun 2010. Ini dikarenakan terjadinya krisis ekonomi yang melanda Eropa dan Amerika Serikat, sehingga berdampak pada melemahnya minat untuk penanaman modal. Meskipun berfluktuatif, namun PMDN di Jawa Tengah menunjukkan tren yang naik setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2015 arus modal dalam negeri yang masuk tercatat sebesar 13.061,19 miliar atau meningkat secara signifikan yaitu 1.420,36 persen dibanding tahun 2014. Peningkatan ini disebabkan karena peraturan pemerintah tentang kemudahan izin penanaman modal, sehingga menarik banyak investor. Persentase realisasi PMA lebih besar yaitu sebesar 89,33 persen dan persentase PMDN lebih sedikit yaitu 10,67 persen dari total investasi sebesar 283.160,12 miliar rupiah sejak tahun 2011 sampai 2015. Seperti yang sudah dijelaskan dalam tabel 1 dan tabel 2, meskipun rata-rata PMDN Jawa Tengah lebih kecil dibandingkan Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta namun terdapat penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Berikut data penyerapan tenaga kerja dari adanya Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2016 :

Tabel 1.4 Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Jawa Tengah 2011–2016

| Tahun | Penyerapan Tenaga Kerja | | | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| | PMA (Jiwa) | Pertumbuhan (Persen) | PMDN (Jiwa) | Pertumbuhan (Persen) |
| 2011 | 26.258 | 88,79 | 24.077 | 66,16 |
| 2012 | 23.353 | -11,06 | 21.971 | -8,74 |
| 2013 | 34.250 | 46,66 | 19.341 | -11,97 |
| 2014 | 25.011 | -26,97 | 13.072 | -32,41 |
| 2015 | 73.292 | 193,03 | 42.269 | 223,35 |
| 2016 | 125.204 | 70,82 | 50.008 | 18,3 |
| Jumlah | 321.276 | | 185.228 | |
| Rata-rata | 51.228 | 60,21 | 28.456 | 42,44 |

Sumber : Jawa Tengah dalam Angka (beberapa edisi)

Dari tabel 1.4 di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2011 sampai 2016 pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dari PMDN yaitu 42,44 persen per tahun dan PMA sebesar 60,21 persen per tahun. Penyerapan tenaga kerja dari PMDN lebih kecil dibandingkan PMA, karena realisasi PMA lebih banyak daripada PMDN seperti yang sudah dijelaskan dalam Tabel 1.3.

Kesuksesan Jawa Tengah menarik investor juga dibuktikan dengan diterimanya sejumlah penghargaan. Antara lain TOP 35 Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) tahun 2016 atas Inovasi PACAR BINAL (Pangkalan Cari Izin Bagi Nelayan) yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Selain itu juga menjadi Provinsi terbaik ke III memiliki daya saing investasi dari Lee Kuan Yew-National University of Singapore.

Penanaman modal dalam negeri di Jawa Tengah diatur sendiri oleh pemerintah daerah karena adanya otonomi daerah. Kebijakan pro investasi di masa pemerintahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah membuahkan hasil.

Hal ini terlihat dari iklim investasi di Jateng yang tumbuh signifikan dengan angka rata-rata mencapai 52,31 persen per tahun sejak 2013.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prasetyo Aribowo mengatakan pencapaian tersebut tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mendorong investasi. Antara lain melalui penciptaan iklim yang kondusif, promosi, pengendalian dan pengembangan serta optimalisasi pelayanan. Pertumbuhan investasi ini menurutnya sejalan dengan kebijakan pembangunan Jawa Tengah dan berkontribusi dalam serapan tenaga kerja untuk menurunkan angka pengangguran.

Kebijakan pro investasi ini juga menjadikan Jawa Tengah primadona investasi. Data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah menyebutkan adanya relokasi 47 pabrik tekstil ke Jawa Tengah dengan serapan tenaga kerja hingga 70 ribu orang pada 2015. Bahkan, Jawa Tengah mengaku siap menerima limpahan pabrik dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Kesiapan itu bisa terlihat dari pengembangan kawasan industri di Kabupaten Kendal yang dilengkapi dengan sejumlah fasilitas umum seperti rumah susun, sekolah, pasar, taman, rumah sakit dan sejumlah fasilitas lain.

Menurut Nopirin (2000) Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi, dimana investasi merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Kemudian peningkatan stok modal akan meningkatkan produktivitas serta kuantitas dan kualitas produksi, yang nantinya

akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Suatu negara akan berkembang secara dinamis jika investasi yang dikeluarkan lebih besar daripada nilai penyusutan faktor-faktor produksi. Dan sebaliknya, jika investasi lebih kecil daripada penyusutan faktor-faktor produksinya maka akan cenderung mengalami perekonomian yang stagnasi atau mengalami kemacetan. Laju pertumbuhan yang lambat merupakan gambaran kondisi perekonomian yang mengalami stagnasi.

Inflasi juga dapat mempengaruhi kegiatan investasi, hal ini dapat dilihat dari pengaruh inflasi terhadap kenaikan produksi. Karena dalam keadaan inflasi akan terjadi kenaikan harga barang, sehingga keuntungan perusahaan naik. Namun apabila laju inflasi itu cukup tinggi akan berakibat sebaliknya, yaitu penurunan output. Dalam keadaan inflasi yang tinggi nilai uang riil turun dengan drastis, yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi barang. Inflasi bisa diikuti dengan kenaikan output, tetapi bisa juga diikuti dengan penurunan output. Tetapi dalam keadaan yang pernah terjadi biasanya nilai inflasi yang lebih besar akan menaikkan output. Jika output meningkat itu akan membuat pengusaha atau perusahaan untuk berinvestasi atau menanamkan modal mereka. Hal ini dilakukan dengan harapan investor tersebut akan mendapatkan keuntungan yang lebih karena adanya kenaikan harga tersebut.

Investor asing akan lebih berminat untuk melakukan penanaman modal asing apabila diasumsikan tersedianya tenaga kerja yang berlimpah untuk melakukan investasinya. Fungsi permintaan tenaga kerja biasanya didasarkan pada teori ekonomi neoklasik, di mana dalam ekonomi pasar diasumsikan bahwa pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga pasar (*price taker*). Dalam hal

memaksimalkan laba, pengusaha hanya dapat mengatur berapa jumlah tenaga kerja yang dapat dipekerjakan. Peningkatan jumlah tenaga kerja dalam suatu lapangan usaha tidak dilakukan untuk jangka pendek, walaupun permintaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan tinggi. Dalam jangka pendek, pengusaha lebih mengoptimalkan jumlah tenaga kerja yang ada dengan penambahan jam kerja atau penggunaan mekanisasi, sedangkan dalam jangka panjang kenaikan jumlah permintaan masyarakat akan direspon dengan menambah jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Hal ini berarti terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja baru. Tersedianya tenaga kerja ini dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka (Arfida, 2003)

Selain faktor-faktor diatas, faktor lain yang dapat mempengaruhi penanaman modal dalam negeri adalah pengeluaran pemerintah. Salah satu tujuan peningkatan pengeluaran pemerintah ini adalah untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah, tentu anggaran untuk membuat sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan investasi bisa lebih besar. Sarana dan prasarana tadi bisa berupa jalan, rel kereta api, pelabuhan, pembangkit listrik, dan lain-lain. Sebagai konsekuensinya, peningkatan pengeluaran pemerintah ini juga kerap diiringi dengan peningkatan defisit anggaran. Defisit ini muncul karena total penerimaan pemerintah tidak dapat mencukupi total pengeluaran yang dianggarkan.

Faktor selanjutnya yaitu suku bunga kredit investasi. Kredit investasi biasanya berupa utang khusus untuk pembelian dan penambahan barang modal dengan sistem *two step loan* dari Bank Indonesia. Untuk mengembalikan utang

jenis ini investor dapat memilih akan mengembalikannya dalam periode waktu menengah atau jangka panjang. Keputusan investasi dan pembiayaan merupakan keputusan yang saling berkaitan, dimana satu sisi adalah keputusan investasi maka di sisi lain adalah keputusan pembiayaan. Secara teoritis, keterandalan keputusan investasi dan pembiayaan sangatlah bergantung pada tingkat suku bunga yang berlaku. Menurut Lawrence J Gitman (2012) tingkat suku bunga merupakan kompensasi yang harus dibayar oleh pihak peminjam dana (*borrower*) kepada pihak yang meminjamkan (*lender*).

Untuk mencapai hasil yang optimal dalam rangka peningkatan investasi khususnya di Provinsi Jawa Tengah, maka diperlukan lebih banyak faktor penunjang yang bisa membuat para investor yakin untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu penting untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri di Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

Investasi merupakan modal penting bagi negara-negara berkembang, karena memiliki peranan yang besar dalam proses pembangunan ekonomi. Ketika perusahaan ingin berinvestasi dalam modal baru, perusahaan membutuhkan sumber-sumber pendanaan. Sumber-sumber pendanaan ini bentuknya bermacam-macam, yaitu bisa dengan memperoleh pinjaman dari bank, menjual obligasi kepada publik, atau menjual saham di pasar saham untuk mendapatkan laba di masa yang akan datang. Cara mendapatkan sumber pendanaan ini dijelaskan dengan model neoklasik. Model ini mengasumsikan bahwa jika perusahaan ingin

membayar biaya modal, maka pasar uang akan menyediakan dananya (Mankiw, 2007).

Masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan yaitu adanya keterbatasan pendanaan (*financing constraints*). Dalam hal ini bank memiliki peran penting sebagai sumber pendanaan investasi. Mereka bertindak sebagai perantara (*intermediaries*) antara orang-orang yang ingin menabung dan yang memiliki proyek-proyek investasi baru yang menguntungkan tetapi belum punya dana. Ketika bank mengalami atau nyaris bangkrut, mereka menjadi kurang mampu menjalankan fungsi perantara ini (Nopirin, 2000).

Sumber pendanaan investasi dapat diperoleh dari para pelaku ekonomi yang terlibat dalam proses kegiatan akumulasi tabungan domestik serta para pemberi bantuan yaitu bisa pemerintah, perusahaan swasta, rumah tangga, lembaga keuangan, dan negara pendonor. Berbagai faktor ekonomi internal yang mempengaruhi penanaman modal dalam suatu perekonomian di antaranya adalah permintaan masyarakat yang dapat tercermin dari pertumbuhan ekonomi, suku bunga, inflasi, ketersediaan tenaga kerja dan tingkat upahnya, dan ketersediaan sumber daya lainnya serta sejumlah faktor sosial dan politik seperti kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan iklim investasi.

Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Selanjutnya peningkatan stok modal akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kuantitas produksi, yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun jika terjadi inflasi harga faktor

produksi akan meningkat dan mengakibatkan meningkatkan biaya produksi. Biaya produksi yang meningkat akan berdampak pula terhadap harga produk atau output. Terjadinya inflasi akan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat karena masyarakat dihadapkan dengan harga-harga barang yang semakin mahal. Menurunnya daya beli masyarakat ini berdampak pada keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin menurun sedangkan biaya operasional semakin tinggi karena harga faktor produksi yang tinggi pula. Karena pengusaha tidak bisa mempengaruhi harga pasar, maka untuk meningkatkan keuntungan, pengusaha akan mengoptimalkan jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang tersedia dapat dilihat dari jumlah pengangguran terbuka.

Investor atau pengusaha akan menanamkan modalnya di wilayah yang sarana dan prasarana mendukung untuk kegiatan usahanya. Jika sarana prasarana seperti jalan, rel kereta api, pelabuhan, pembangkit listrik, dan lain-lain tersedia, maka akan memperlancar kegiatan perekonomian dan meningkatkan keuntungan. Sarana dan prasarana ini disediakan pemerintah melalui pengeluaran pemerintah. Selanjutnya yang mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi yaitu suku bunga kredit investasi. Jika suku bunga kredit investasi tinggi, maka investor akan lebih tertarik untuk menabung dan mendapat keuntungan dari bunga yang didapat. Namun jika suku bunga kredit investasi sedang rendah investor tidak ingin menabung dan menggunakan uangnya untuk investasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1 Bagaimanakah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan suku bunga kredit investasi berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jawa Tengah tahun 2000-2016?
- 2 Variabel manakah yang paling berpengaruh pada penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jawa Tengah tahun 2000-2016?

C. Pembatasan Masalah Penelitian

Penelitian ini dibatasi selama 16 tahun dari tahun 2000-2016. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penanaman modal dalam negeri. Sedangkan variabel independennya pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan suku bunga kredit investasi.

D. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan suku bunga kredit investasi terhadap penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jawa Tengah tahun 2000-2016.
- 2 Untuk mengetahui variabel manakah yang paling berpengaruh pada penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jawa Tengah tahun 2000-2016.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmu ekonomi pembangunan dalam ruang lingkup pemerintahan dan juga dapat dijadikan referensi dalam penelitian yang akan datang

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pengambilan kebijakan strategis mengenai Penanaman Modal dalam Negeri untuk instansi pemerintah terkait.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ataupun sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik pemerintah maupun pihak swasta dalam hal pengambilan keputusan penanaman modal dan memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi media pengaplikasian dari ilmu yang telah dipelajari selama kuliah di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jendral Soedirman sebagai upaya untuk pemenuhan tugas akhir masa perkuliahan dan sebagai salah satu syarat kelulusan program Sarjana (S1) Universitas Jendral Soedirman.

II. TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

a. Pengertian Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Misalnya seorang investor membeli saham di suatu perusahaan sekarang, harapannya ia akan memperoleh keuntungan dari harga saham ataupun sejumlah deviden yang mengalami kenaikan di masa depan, sebagai imbalan atas jangka waktu dari risiko dari investasi tersebut. (Tandelilin, 2001)

b. Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanamkan modal sebagai usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal boleh dilakukan oleh siapa saja baik perseorangan, badan usaha, maupun pemerintah negeri asalkan masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Dasar Keputusan Investasi

Keputusan untuk berinvestasi dipengaruhi oleh tingkat return yang diharapkan, tingkat risiko, serta hubungan antara return dan risiko (Tandelin, 2001)

a. Return

Return menurut manajemen investasi adalah tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor dari investasi yang dilakukannya. Keuntungan ini merupakan kompensasi atas biaya kesempatan (*opportunity cost*) dan resiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Terdapat perbedaan antara *return* yang diharapkan (*expected return*) dan *return* yang terjadi (*realized return*). *Return* yang diharapkan (*expected return*) adalah keuntungan yang diantisipasi investor di masa yang akan datang. Sedangkan *return* yang terjadi (*realized return*) adalah keuntungan yang telah diperoleh investor dimasa lalu. Perbedaannya adalah resiko yang harus selalu dipertimbangkan dalam proses investasi tersebut.

b. Risiko

Risiko bisa diartikan sebagai kemungkinan *return* yang terjadi berbeda dengan *return* yang diharapkan. Biasanya, semakin besar risiko yang ditanggung investor maka tingkat *return* yang diharapkan juga semakin besar. Dalam ilmu investasi terdapat asumsi bahwa investor adalah makhluk yang rasional, artinya para investor tidak akan menyukai ketidakpastian atau risiko. Investor tidak akan mau mengambil risiko berinvestasi jika investasi tersebut tidak memberikan *return* yang sesuai

harapan sebagai kompensasi atas risiko yang harus ditanggung investor tersebut.

c. Hubungan tingkat risiko dan *return* yang diharapkan

Tingkat risiko dan *return* yang diharapkan memiliki hubungan yang bersifat linier. Artinya semakin besar risiko suatu aset, maka *return* yang diharapkan atas aset tersebut juga semakin besar, begitu pula sebaliknya.

Menurut Kuznets dalam Jhingan (2013) Pembentukan modal domestik tidak hanya mencakup biaya untuk konstruksi, peralatan dan persediaan dalam negeri, tetapi juga pengeluaran lain, kecuali pengeluaran yang diperlukan untuk mempertahankan *output* pada tingkat yang ada.

Dalam Jhingan (2013) Pembentukan atau pengumpulan modal dipandang sebagai salah satu faktor dan sekaligus faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Secara rinci fungsi dan manfaat yang diperoleh melalui penanaman modal dalam negeri, antara lain sebagai berikut :

a. Menghemat devisa

Laju pembentukan modal yang cepat lama kelamaan akan mengurangi kebutuhan akan modal asing dan menghemat devisa negara. Hal ini nantinya akan membantu tercapainya swasembada dan mengurangi beban utang luar negeri suatu negara.

b. Mengurangi ketergantungan produk asing

Pembentukan modal juga dapat mengurangi ketergantungan produk asing. Hal ini dikarenakan industri dalam negeri dapat menghasilkan produk yang tidak kalah dari produk asing. Jika kuantitas dan kualitas produk dalam negeri setara dengan kualitas produk asing, maka lebih banyak konsumen yang lebih memilih menggunakan produk dalam negeri dan ekonomi dapat tumbuh.

c. Mendorong kemajuan industri dalam negeri

Pembentukan modal menghasilkan kemajuan teknik produksi yang mendorong tercapainya ekonomi produksi skala luas dan meningkatkan spesialisasi produk. Pembentukan modal memberikan mesin, alat dan perlengkapan bagi industri dalam negeri.

d. Membantu penyerapan kerja

Pembentukan modal menciptakan perluasan pasar dan peningkatan produksi yang mana hal ini akan membuka kesempatan kerja baru bagi tenaga kerja.

d. Pendekatan dalam Berinvestasi

Menurut Prasetyo (2009) pendekatan yang sering digunakan untuk menentukan keputusan berinvestasi dalam perekonomian. yaitu:

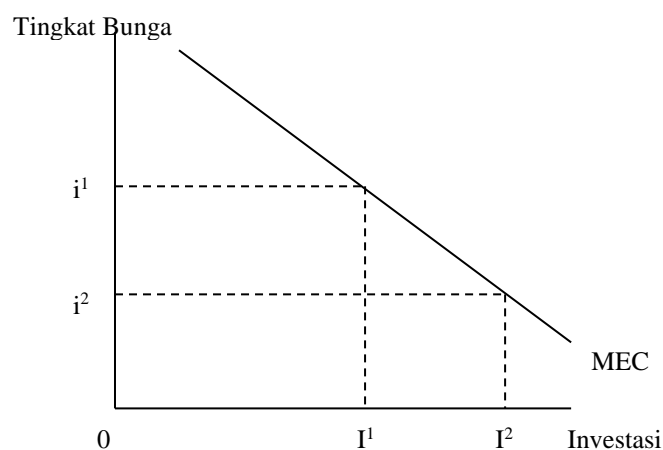
a. Pendekatan Nilai Sekarang (*Present Value*)

Berdasarkan pendekatan ini, proyek investasi dianggap menguntungkan dan dapat diterima jika nilai sekarang dari proyek investasi tersebut lebih

besar daripada besarnya modal yang ditanam atau jika nilai sekarang bersih (NPV) lebih besar daripada nol ($NPV > 0$).

b. Pendekatan *Marginal Efficiency of Capital (MEC)*

Pendekatan ini lebih banyak digunakan dalam literatur ekonomi makro. Dalam ilmu ekonomi, pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan *internal rate of return (IRR)*. *MEC* menggambarkan tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected rate of return*) dari setiap adanya tambahan barang modal atau investasi. Jika tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi lebih besar daripada tingkat bunga, maka pengusaha akan meminjam uang dari bank atau pasar modal untuk berinvestasi. Namun sebaliknya, jika tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi lebih rendah dari tingkat bunga yang berlaku maka pengusaha tidak akan meminjam uang dari bank dan tidak ingin berinvestasi, dan lebih memilih untuk menabung atau menyimpan uang di bank.



Sumber : Prasetyo (2009)

Gambar 2.1. Hubungan Tingkat Bunga dan Investasi

Hubungan antara tingkat bunga, investasi dan kurva *MEC* dapat dideskripsikan seperti pada Gambar 2.1 di atas. Jika tingkat suku bunga bank yang berlaku adalah i^1 , pengusaha yang rasional tidak akan berinvestasi karena lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih besar sehingga investasi di titik I^1 . Sebaliknya, jika tingkat suku bunga turun menjadi i^2 , pengusaha akan melakukan investasi dan jumlah investasi akan bertambah menjadi I^2 .

c. Pendekatan Investasi di Pasar Uang

Kegiatan investasi juga dapat dilakukan di pasar uang. Keputusan kita ingin melakukan investasi domestik dan melakukan pinjaman keluar negeri atau pinjaman dalam negeri untuk diinvestasikan di mata uang asing juga dapat dilakukan.

d. Pendekatan Nilai *Capital Output Ratio (COR)* dan *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*

Dengan adanya sumber daya alam dan sumber daya manusia, maka kapasitas produksi nasional akan meningkat karena meningkatnya stok kapital. Begitu pula sebaliknya, jika stok kapital nasional menurun, maka kapasitas produksi nasional akan menurun juga. Alat - alat kapital setiap tahun mengalami penyusutan atau depresiasi. Dengan adanya penyusutan ini, maka kapasitas produksi nasional akan menurun, kecuali jika penyusutan ini diimbangi dengan investasi baru yang jumlahnya lebih besar daripada penyusutannya. (Prasetyo, 2009)

2. Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan jumlah output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu, misal satu tahun. (Prasetyo, 2009) Ada 3 hal yang ditekankan dalam pertumbuhan ekonomi yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Proses disini bukan merupakan gambaran ekonomi pada satu periode saja tetapi dalam jangka panjang. Sehingga dapat diamati bagaimana suatu perekonomian berubah atau berkembang dari waktu ke waktu.

b. Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi

Kegiatan pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit, untuk itu negara berkembang perlu menyiapkan dana untuk kegiatan pembangunannya (Gunawati, 2014). Menurut model pertumbuhan Harrod Domar dalam Todaro (2006), strategi utama pembangunan yang diperlukan untuk dapat lepas landas salah satunya adalah mobilisasi tabungan dalam dan luar negeri untuk menghasilkan investasi yang cukup guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Model ini menjabarkan tentang mekanisme perekonomian dimana investasi yang lebih banyak akan menghasilkan pertumbuhan lebih besar.

Kriteria pertumbuhan menurut Harrod sebagai berikut :

$$G = \frac{i}{ICOR}$$

Keterangan :

G = pertumbuhan ekonomi
 i = persentase investasi dari pendapatan nasional ($i=I/Y$)
 $ICOR = \Delta K / \Delta Y$
 ΔK = pertambahan modal
 $i = G \times ICOR = I/Y$

Dari persamaan tersebut, logikanya agar pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh sesuai target, maka persentase investasi dari pendapatan nasional harus lebih besar daripada rasio pertambahan modal (*Incremental Capital-Output Ratio = ICOR*) (Gunawati, 2014).

c. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif dengan Penanaman Modal Dalam Negeri. Karena jika pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan dinamis maka investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Selanjutnya peningkatan stok modal tersebut akan meningkatkan produktivitas serta kuantitas dan kualitas produksi, yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Tingkat Inflasi

a. Pengertian Inflasi

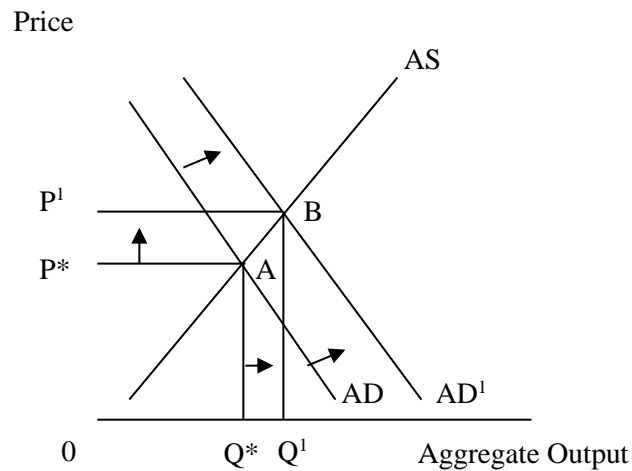
Menurut Budiono (2005) Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi. Disebut inflasi apabila kenaikan harga terjadi pada barang-barang lain. Ada berbagai cara untuk menggolongkan macam-macam inflasi. Berdasarkan parahnya tidaknya, inflasi dapat dibedakan menjadi :

- 1) Inflasi ringan (di bawah 10 persen setahun)
- 2) Inflasi sedang (antara 10-30 persen setahun)
- 3) Inflasi berat (antara 30-100 persen setahun)
- 4) Hyperinflasi (di atas 100 persen setahun)

b. Teori-teori Inflasi

Berdasarkan sebab terjadinya inflasi, inflasi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

- 1) Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. Inflasi ini disebut *demand inflation*.

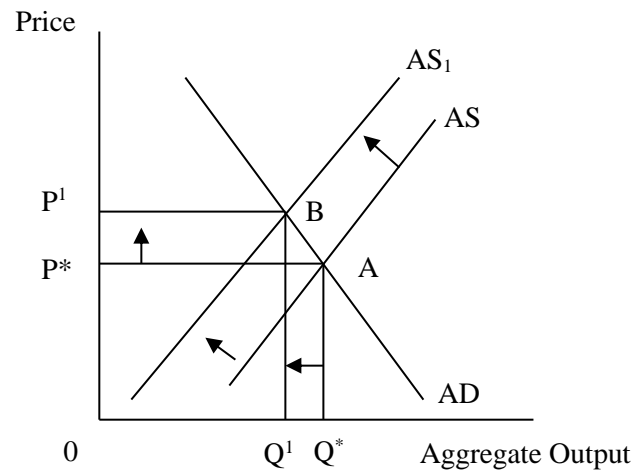


Sumber : Budiono (2005)

Gambar 2.2. *Demand Inflation*

Gambar 2.2 menggambarkan keadaan *demand inflation*. Karena permintaan masyarakat akan barang-barang (*aggregate demand*) bertambah (misalnya karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang, atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor, atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah), maka kurva *aggregate demand* bergeser dari Z_1 ke Z_2 . Akibatnya tingkat harga umum akan naik dari P_1 ke P_2 .

- 2) Inflasi yang timbul karena biaya produksi terlalu tinggi disebut *cost inflation*. Model ini kadang-kadang disebut sebagai “model dilema” karena tekanan sisi penawaran menimbulkan kesulitan bagi kebijakan stabilisasi.



Sumber : Boediono (2005)

Gambar 2.3. *Cost Inflation*

Pada Gambar 2.3 terlihat bahwa ongkos produksi naik (misalnya karena harga bahan produksi yang didatangkan dari luar negeri harganya naik atau harga bahan bakar minyak naik) maka kurva penawaran masyarakat (*Aggregate supply*) bergeser dari S_1 ke S_2 (Boediono, 2005).

c. Hubungan Inflasi dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Inflasi memiliki hubungan negatif dengan Penanaman Modal Dalam Negeri, karena inflasi akan meningkatkan harga faktor produksi yang akhirnya akan meningkatkan biaya produksi. Biaya produksi yang meningkat akan berdampak juga terhadap harga produk atau output. Terjadinya inflasi akan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat karena masyarakat dihadapkan dengan harga-harga barang yang semakin mahal. Menurunnya daya beli masyarakat ini berdampak pada keuntungan yang diperoleh perusahaan yang semakin menurun sedangkan biaya operasional semakin tinggi karena harga faktor produksi yang tinggi pula.

Berdasarkan teori *return ratio*, jika tingkat inflasi tinggi maka pengembalian atas investasi akan turun. Investor tidak ingin menanamkan modalnya jika *return* yang diterima tidak sesuai dengan resiko atas investasinya, sehingga berdampak terhadap nilai PMDN yang semakin menurun.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

a. Pengertian Pengangguran

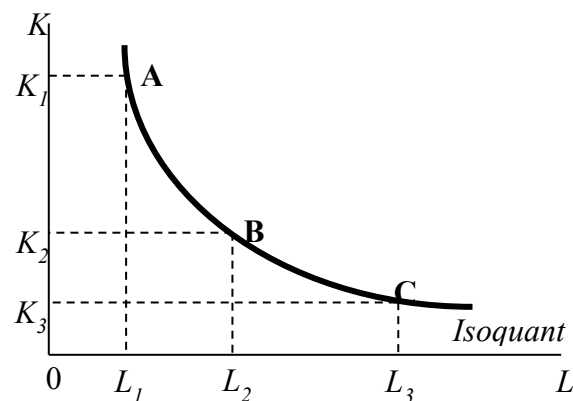
Pengangguran adalah kelompok angkatan kerja yang belum mendapat pekerjaan atau tidak bekerja. Tidak memiliki pekerjaan itu bisa berarti sudah berusaha mencari pekerjaan namun belum berhasil, atau sebaliknya sama sekali belum beruntung mendapatkan pekerjaan tetapi sudah berusaha mencari pekerjaan, namun dapat juga berarti belum berusaha mencari pekerjaan. Tidak bekerja dapat diartikan sebagai angkatan kerja yang tidak mau bekerja atau karena suatu hal tidak mau atau tidak dapat bekerja. (Sukirno, 2000)

b. Teori-Teori Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran adalah statistik yang mengukur presentase orang-orang yang ingin bekerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan (Mankiw, 2006). Sedangkan pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah golongan angkatan kerja yang benar-benar tidak mendapatkan kesempatan bekerja sehingga tidak mendapat penghasilan (Sukirno, 2000).

Dalam teori neoklasik diasumsikan bahwa pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga pasar (price taker) sehingga pengusaha hanya dapat mengatur jumlah tenaga kerja yang dapat dipekerjakan (Arfida, 2003). Jumlah tenaga kerja yang besar artinya jumlah tenaga produktif juga besar. Dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja diharapkan akan meningkatkan produksi. Menurut Nicholson (2008) bahwa:

Suatu fungsi produksi pada suatu barang atau jasa tertentu (Q) adalah $Q = f(K, L)$ dimana K merupakan modal dan L adalah tenaga kerja memperlihatkan jumlah maksimum sebuah barang/jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara K dan L



Sumber : Nicholson (2008)

Gambar 2.4. *Isoquant*

Dari Gambar 2.4 terlihat bahwa, apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan output yang dapat diproduksi. Semakin ke kanan kurva *isoquant*, menunjukkan output yang semakin tinggi.

Produktivitas tenaga kerja sangat berperan penting dalam perkembangan investasi khususnya di sektor industri. Semakin tinggi produktivitas maka dampaknya akan semakin baik terhadap perkembangan investasi, karena keuntungan yang didapat investor akan bertambah, begitu juga sebaliknya, tenaga kerja yang tidak produktif akan mengakibatkan biaya produksi menjadi tinggi yang akan merugikan perusahaan atau investor itu sendiri.

Namun, ada dua masalah ketenagakerjaan yang dapat mempengaruhi minat investasi yaitu upah minimum yang cenderung meningkat dan besarnya biaya-biaya non-upah serta adanya ketidakpastian hubungan industrial antara perusahaan dan tenaga kerja. Kedua masalah ini mengakibatkan biaya yang berkaitan dengan biaya produksi yang menjadi tinggi. (Sitompul, 2008)

c. Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Penanaman Modal Dalam Negeri

Faktor tenaga kerja merupakan faktor yang cukup penting dalam usaha meningkatkan investasi, karena faktor tenaga kerja dianggap sebagai salah satu faktor produksi yang mampu meningkatkan daya guna faktor produksi lainnya seperti mengolah bahan mentah, memanfaatkan modal dan sebagainya. Hal ini akan meningkatkan jumlah produksi perusahaan dan selanjutnya akan menambah keuntungan perusahaan dan atau investor.

5. Pengeluaran Pemerintah

a. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Jika dilihat dari perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, peranan pemerintah dalam perekonomian semakin meningkat. Semakin meningkatnya peranan pemerintah ini dapat dilihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam proporsinya terhadap pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah, yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin banyak pula pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan. (Suparmoko, 2000)

b. Teori-teori Pengeluaran Pemerintah

Adolph Wagner dalam Suparmoko (2000) mengemukakan suatu hukum yang disebut “*Law of Ever Increasing State Activity*” (hukum tentang kegiatan pemerintah yang selalu meningkat). Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Kelima penyebab tersebut adalah tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi, dan ketidakefesiensinan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.

Menurut Suparmoko (2000) Pengeluaran pemerintah dapat dilihat dari berbagai sisi, sehingga dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

- a. Pengeluaran merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang.
- b. Pengeluaran langsung memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat.
- c. Pengeluaran merupakan langkah penghematan untuk masa yang akan datang.
- d. Pengeluaran menyediakan lebih banyak kesempatan kerja dan penyebaran tenaga kerja yang lebih luas.

Berdasarkan penilaian di atas dapat dibedakan macam-macam pengeluaran negara, yaitu :

1. Pengeluaran yang “*self-liquidating*” sebagian atau seluruhnya, artinya dari pengeluaran pemerintah itu nantinya akan mendapatkan pembayaran kembali (*return*) dari masyarakat yang menerima jasa-jasa atau barang-barang yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan negara, atau untuk proyek-proyek produktif barang ekspor.
2. Pengeluaran yang reproduktif, artinya menciptakan keuntungan-keuntungan bagi masyarakat. Semakin tinggi tingkatan penghasilan dan semakin banyak sasaran pajak nantinya akan meningkatkan penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk bidang irigasi, pertanian, pendidikan, kesehatan masyarakat (*public health*) dan sebagainya.

3. Pengeluaran yang tidak “*self-liquidating*” maupun yang tidak reproduktif, yaitu pengeluaran yang secara langsung menambah kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk sarana rekreasi dan hiburan, pendirian monumen dan sebagainya. Nantinya dari jasa-jasa tersebut akan meningkatkan penghasilan nasional
4. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan. Misalnya untuk pembiayaan pertahanan atau perang, hanya penghasilan golongan tertentu saja yang naik dari adanya pengeluaran tersebut.
5. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang. Misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Karena semakin besar anak-anak tersebut maka kebutuhannya juga semakin banyak dan tidak mungkin ditanggung semua oleh pemerintah. Kalau hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di masa mendatang pada waktu usia yang lebih lanjut pasti akan sangat besar. (Suparmoko, 2000)

c. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Penanaman Modal Dalam Negeri

Pemerintah harus dapat mengalokasikan pengeluaran negara dengan tepat terutama untuk pembiayaan pembangunan dan atau perbaikan infrastruktur seperti transportasi, komunikasi, dan energi sehingga dapat meningkatkan investasi. Oleh karena itu hubungan antara pengeluaran pemerintah dan investasi adalah positif.

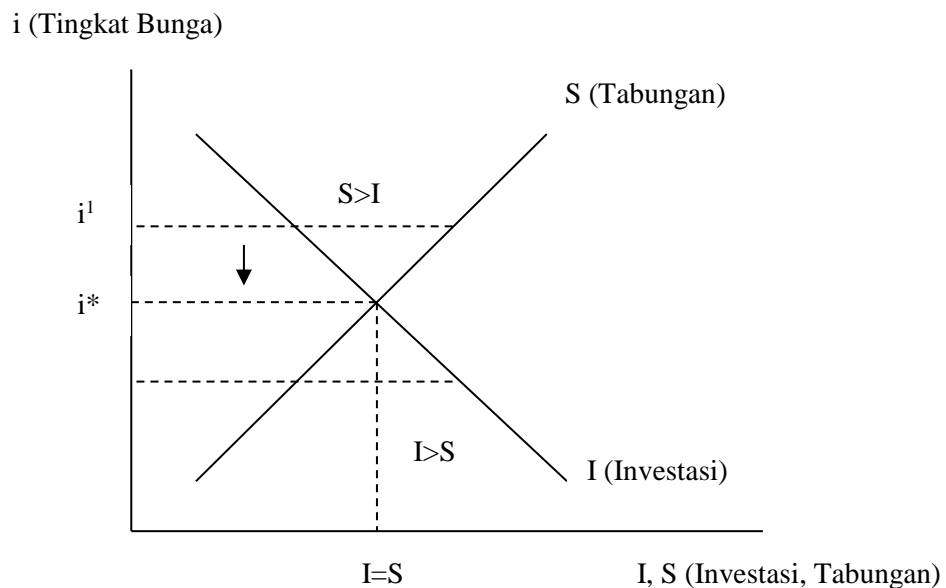
6. Suku Bunga Kredit Investasi

a. Pengertian Suku Bunga Kredit Investasi

Suku bunga kredit investasi adalah suku bunga yang dikenakan bagi (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru. Misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai dari kredit. (Nopirin, 2000)

b. Teori-Teori Suku Bunga

Pengaruh dari suku bunga kredit terhadap investasi juga dijelaskan oleh pemikiran ahli-ahli ekonomi Klasik yang menyatakan bahwa investasi adalah fungsi dari tingkat bunga. Dalam investasi, semakin tinggi tingkat bunga maka keinginan untuk melakukan investasi juga semakin kecil. Seorang investor akan berinvestasi lebih banyak jika keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar dari tingkat bunga yang harus dia bayarkan untuk dana investasi. Dana yang harus dikeluarkan investor untuk membayar bunga disebut ongkos penggunaan dana (*cost of capital*). Semakin rendah tingkat bunga, maka investor akan lebih tertarik untuk berinvestasi, karena biaya penggunaan dana juga semakin kecil. (Nopirin, 2000)



Sumber : Nopirin (2000)

Gambar 2.5. Teori Klasik Tentang Tingkat Bunga

Pada Gambar 2.5 menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat bunga maka keinginan seseorang untuk menabung akan meningkat atau positif. Semakin tinggi tingkat bunga maka keinginan untuk investasi akan menurun. Hal ini dikarenakan jika bunganya tinggi maka orang-orang tidak akan mau pinjam dana untuk diinvestasikan, jadi hubungannya negatif. Jika tabungan lebih besar daripada investasi ($S > I$) berarti ada dana yang menganggur, maka para pemilik dana akan berlomba-lomba meminjamkan dananya kepada calon investor. Karena adanya kompetisi antar pemilik dana, maka tingkat bunga akan turun kembali pada kondisi keseimbangan atau i^* . Dan sebaliknya, jika investasi lebih besar daripada tabungan ($I > S$) artinya tidak ada dana yang menganggur, maka calon investor berlomba-lomba mencari dana. Karena adanya kompetisi antar

calon investor, maka tingkat bunga akan naik dan kembali pada kondisi keseimbangan atau i^* .

Analisis biaya investasi lebih rumit jika dibandingkan dengan biaya komoditi lain. Karena barang-barang modal merupakan barang yang berumur panjang. Apabila membeli barang-barang yang berumur panjang, maka harus menghitung harga dari barang tersebut, dalam hal ini dapat dinyatakan dalam tingkat bunga pinjaman atau kredit. (Samuelson, 2003).

c. Hubungan Suku Bunga Kredit Investasi dengan Penanaman Modal Dalam Negeri

Hubungan antara suku bunga kredit investasi dan penanaman modal dalam negeri yaitu jika semakin rendah tingkat bunga maka semakin tinggi pula keinginan investor untuk melakukan investasi. Dalam hal ini, investasi dapat diasumsikan sebagai penanaman modal, sehingga semakin rendah tingkat suku bunga maka semakin tinggi PMDN dan kedua variabel ini memiliki hubungan negatif.

B. Pengembangan Hipotesis

1. Penelitian Terdahulu

Di dalam suatu penelitian perlu adanya hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai bahan referensi. Berikut hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan bahan referensi dalam penelitian ini :

| No | Nama dan Judul Penelitian | Variabel dan Metode Penelitian | Hasil |
|----|--|---|---|
| 1. | Dewi dan Cahyono (2016) Judul: Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, BI <i>Rate</i> , dan Inflasi Terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia | Variabel dependen: Investasi Asing Langsung Variabel independen: Pertumbuhan Ekonomi, BI <i>Rate</i> , dan Inflasi, Metode Penelitian: Regresi linier berganda | Pertumbuhan ekonomi, berpengaruh negatif tidak signifikan, BI <i>Rate</i> berpengaruh negatif signifikan dan Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Investasi asing langsung di Indonesia. |
| 2. | Dewi dan Triaryati (2015) Judul: Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga, dan Pajak Terhadap Investasi Asing Langsung | Variabel dependen: Investasi Asing Langsung Variabel independen: Pertumbuhan ekonomi, Suku Bunga, dan Pajak Metode Penelitian: Regresi linier berganda | Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap investasi asing langsung, sedangkan suku bunga dan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap investasi asing langsung. |
| 3. | Marsela (2014) Judul: Pengaruh Tingkat Inflasi, Suku Bunga Kredit, Serta Kurs Dollar Terhadap Investasi | Variabel dependen: Investasi Variabel independen: Tingkat inflasi, PDRB, Suku bunga kredit, dan Kurs dollar Metode Penelitian: Regresi linier berganda | PDRB berpengaruh signifikan dengan arah positif sedangkan variabel kurs dollar Amerika memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif. Variabel tingkat inflasi dan suku bunga kredit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah investasi. |

| No | Nama dan Judul Penelitian | Variabel dan Metode Penelitian | Hasil |
|----|--|--|--|
| 5. | Wijayanti dan Yusuf (2011) Judul : Pengaruh Ketersediaan Tenaga Kerja, Infrastruktur, Pendapatan Perkapita dan Suku Bunga Terhadap Investasi Industri Kota Semarang | Variabel dependen: Investasi Industri Variabel independen: Ketersediaan tenaga kerja, infrastruktur, pendapatan perkapita, dan suku bunga Metode Penelitian: Error Correction Model (ECM) | Dalam Jangka panjang ketersediaan tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan, infrastruktur dan suku bunga berpengaruh negatif signifikan, pendapatan perkapita berpengaruh positif signifikan terhadap investasi industri. Sedangkan dalam jangka pendek, ketersediaan tenaga kerja dan infrastruktur berpengaruh negatif dan tidak signifikan, pendapatan perkapita berpengaruh positif signifikan dan suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap investasi industri. |
| 6. | Thirafi (2013) Judul : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketersediaan Tenaga Kerja, Infrastruktur dan Kepadatan Penduduk Terhadap Penanaman Modal Asing di Kabupaten Kendal | Variabel dependen: Penanaman Modal Asing Variabel independen: Pertumbuhan Ekonomi, Ketersediaan tenaga kerja, Infrastruktur, dan Kepadatan penduduk Metode Penelitian: Error Correction Model (ECM) | Dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan angkatan kerja dan kepadatan penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan. Dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan sedangkan angkatan kerja, infrastruktur dan kepadatan penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan. |

| No | Nama dan Judul Penelitian | Variabel dan Metode Penelitian | Hasil |
|----|--|---|--|
| 7. | Prihatiningsih dan Wantara (2014) Judul: Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto, Suku Bunga, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Investasi di Indonesia Tahun 1992-2012 | Variabel dependen: Investasi Variabel independen: Produk Domestik Bruto, Suku bunga, dan Pengeluaran pemerintah Metode Penelitian: Regresi linier berganda | Produk Domestik Bruto dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap investasi sedangkan suku bunga tidak berpengaruh terhadap investasi. Produk Domestik Bruto, suku bunga dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap investasi. |
| 8. | Sudirman (2017) Judul : Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Ekspor Dan Inflasi Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kalimantan Tengah | Variabel dependen: Investasi PMDN Variabel independen: Tenaga kerja, Ekspor, Inflasi dan Krisis ekonomi Metode Penelitian: Regresi linier berganda | Secara parsial variabel Tenaga kerja, Ekspor, Inflasi berpengaruh positif signifikan, sedangkan krisis ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap PMDN. Secara simultan variabel Tenaga kerja, Ekspor, Inflasi dan Krisis ekonomi berpengaruh terhadap PMDN |

| No | Nama dan Judul Penelitian | Variabel dan Metode Penelitian | Hasil |
|-----|--|---|--|
| 9. | Septifany, dkk (2015) Judul : Analisis Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah dan Cadangan Devisa Terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia | Variabel dependen: Investasi PMA Variabel independen: Inflasi, Kurs USD, Suku Bunga Kredit, Utang Luar Negeri dan Cadangan Devisa Metode Penelitian: Regresi linier berganda | Inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh negatif signifikan terhadap PMA di Indonesia. Variabel suku bunga SBI dan cadangan devisa berpengaruh positif signifikan terhadap PMA di Indonesia. |
| 10. | Akbar (2011) Judul: Analisis Pengaruh Variabel PDB, Inflasi dan Suku Bunga Kredit Investasi Terhadap PMDN di Indonesia (studi kasus tahun 1984-2009) | Variabel dependen: Realisasi investasi PMDN Variabel independen: PDB, Inflasi dan Suku Bunga Kredit Investasi Metode Penelitian: Regresi linier berganda | PDB dan Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PMDN sedangkan SKBI berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PMDN. |
| 11. | Sohail, Rehman dan Azeem (2014) Judul: Economic Determinant of Domestic Investment : A Case of Pakistan | Variabel dependen: PMDN Variabel independen: PMA, Ekspor, GDP, Impor dan M2 Metode Penelitian: ECM dan Regresi linier berganda | FDI, Ekspor, GDP, dan M2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap PMDN sedangkan Impor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PMDN |

| No | Nama dan Judul Penelitian | Variabel dan Metode Penelitian | Hasil |
|-----|---|---|--|
| 12. | Alkhatib, Altaeb dan Alokor (2006) Judul: Economic Determinant of Domestic Investment | Variabel dependen: PMDN Variabel independen: Tingkat Pertumbuhan GDP, Ekspor, FDI, pertumbuhan sektor keuangan dan modal kerja Metode Penelitian: ECM | Tingkat Pertumbuhan GDP, Ekspor berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan FDI, pertumbuhan sektor keuangan dan modal kerja berpengaruh positif signifikan hanya dalam jangka panjang |
| 13. | Cahyaningsih (2015) Judul: The Analysis of Factors Affecting Foreign Investment in Indonesia) | Variabel dependen: PMA Variabel independen: GDP, Inflasi dan Infrastruktur Metode Penelitian: ECM | Dalam jangka pendek GDP dan infrastruktur berpengaruh positif tidak signifikan dan inflasi berpengaruh negatif signifikan. Sedangkan Dalam jangka panjang GDP dan Infrastruktur berpengaruh positif signifikan dan inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan. |
| 14. | Anthony dan Joe (2015) Judul: Determinants of Investments in the Nigerian Economy: An Empirical Approach (1990 – 2013) | Variabel dependen: Investasi Variabel independen: Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, Kurs, Metode Penelitian: Regresi linier berganda | Inflasi berpengaruh negatif signifikan, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan, sedangkan suku bunga dan kurs berpengaruh negatif tidak signifikan. |

| No | Nama dan Judul Penelitian | Variabel dan Metode Penelitian | Hasil |
|-----|---|--|---|
| 15. | Chenga dan Kwan (2000) Judul: What are the determinants of the location of foreign direct investment? The Chinese experience | Variabel dependen: Lokasi PMA Variabel independen: Pasar regional, infrastruktur, kebijakan pemerintah, upah, dan pendidikan Metode Penelitian: Regresi linier berganda | Pasar regional, infrastruktur dan kebijakan pemerintah berpengaruh positif signifikan dan upah berpengaruh negatif signifikan. Sedangkan pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan. |

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dalam menentukan variabel bebas, waktu yang digunakan dalam penelitian serta lokasi penelitian. Variabel bebas yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan suku bunga kredit investasi tahun 2000-2016 dengan lokasi penelitian adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Kerangka Pemikiran Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya dan untuk mengetahui faktor apa yang paling berpengaruh terhadap minat investor untuk menanamkan modalnya. Faktor tersebut bisa merupakan faktor ekonomi maupun non ekonomi. Faktor ekonomi yang diduga dapat mempengaruhi minat investor dalam negeri dalam menanamkan modalnya di suatu daerah antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah serta suku bunga kredit investasi.

Jika pertumbuhan ekonomi di suatu daerah semakin meningkat dan dinamis maka investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Selanjutnya dari peningkatan stok modal tersebut akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi, yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif karena secara tidak langsung akan meningkatkan minat investor dalam menanamkan modal.

Terjadinya inflasi akan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, karena masyarakat dihadapkan dengan harga-harga barang yang semakin mahal. Menurunnya daya beli masyarakat ini akan berdampak pada semakin menurunnya keuntungan yang diperoleh perusahaan sedangkan biaya operasional semakin tinggi karena harga faktor produksi yang tinggi pula. Oleh karena itu, inflasi berpengaruh negatif terhadap minat investor untuk menanamkan modalnya.

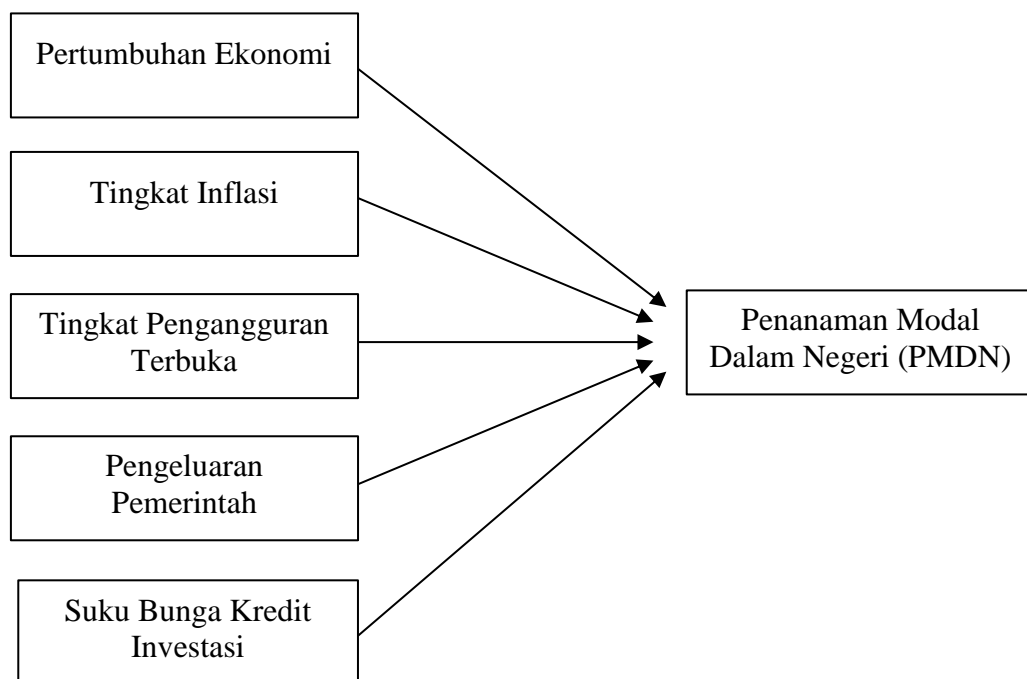
Jumlah tenaga kerja yang tersedia dapat dicerminkan dari jumlah pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka mempengaruhi penanaman modal dalam negeri di suatu daerah karena pengusaha akan menanamkan modalnya di daerah yang terdapat banyak tenaga kerja yang tersedia untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi bisa melalui pengeluaran pemerintah. Pemerintah harus dapat mengalokasikan pengeluaran negara dengan tepat terutama untuk pembiayaan pembangunan dan atau perbaikan infrastruktur seperti transportasi, komunikasi, energi dan lain sebagainya. Investor biasanya

enggan menanamkan modal jika tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan dan risikonya tinggi. Oleh karena itu pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap minat investor untuk berinvestasi.

Kemudian untuk semakin menarik investor, tingkat bunga harus lebih kecil. Karena asumsinya semakin tinggi suku bunga, maka kompensasi yang harus dibayarkan oleh investor dari meminjam modal untuk berinvestasi menjadi semakin banyak. Dalam hal ini investor nantinya akan dirugikan jika keuntungan yang diperolehnya malah digunakan untuk membayar kompensasi pinjaman tersebut.

Dari uraian di atas, kerangka pemikiran yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut :



Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran

3. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat penduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, diperlukan data dan uji yang sesuai untuk dapat menerima atau menolak hipotesis yang diajukan.

Menurut teori dari Harrod Domar, investasi yang lebih banyak akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih besar. Berdasarkan teori *return ratio*, jika tingkat inflasi tinggi maka pengembalian atas investasi akan menurun dan investor tidak ingin menanamkan modal. Dalam teori neoklasik, diasumsikan bahwa pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga pasar (*price taker*) sehingga untuk meningkatkan keuntungan pengusaha hanya dapat mengatur jumlah tenaga kerja yang dapat digunakan. Pengusaha akan menanamkan modal di daerah yang tersedia banyak tenaga kerja. Adolph Wagner mengemukakan hukum “*Law of Ever Increasing State Activity*” (hukum tentang selalu meningkatnya kegiatan pemerintah). Menurut teori ini yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat adalah tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi, dan ketidakefesiensian birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan. Menurut teori klasik, semakin tinggi tingkat bunga maka keinginan untuk melakukan investasi juga semakin kecil.

Menurut penelitian Dewi dan Triaryati (2015) Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap PMDN. Berdasarkan penelitian Marsela (2014), Tingkat Inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap PMDN. Berdasarkan penelitian

Thirafi (2013) Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh positif terhadap PMDN. Berdasarkan penelitian Prihatiningsih dan Wantara (2014) Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap PMDN. Berdasarkan penelitian Akbar (2011) Suku Bunga Kredit Investasi memiliki pengaruh negatif terhadap PMDN.

Oleh karena itu berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pengeluaran Pemerintah dan Suku Bunga Kredit Investasi berpengaruh secara simultan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Tengah. tahun 2000-2016.
2. Diduga bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pengeluaran Pemerintah dan Suku Bunga Kredit Investasi berpengaruh secara parsial terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Tengah. tahun 2000-2016 :
 - a. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap PMDN
 - b. Tingkat Inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap PMDN
 - c. Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh positif terhadap PMDN
 - d. Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap PMDN
 - e. Suku Bunga Kredit Investasi memiliki pengaruh negatif terhadap PMDN

3. Diduga inflasi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Tengah. tahun 2000-2016.

III.METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif, karena data yang diperoleh nantinya berupa angka. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas Penanaman Modal dalam Negeri sebagai variabel terikat (dependen) serta Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pengeluaran Pemerintah dan Suku Bunga Kredit Investasi sebagai variabel bebas (independen).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu Provinsi Jawa Tengah. Dalam artian, dikumpulkan data yang mencakup tentang penanaman modal di Jawa Tengah melalui web resmi yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder atau literatur sekunder adalah literatur yang memberikan informasi tentang literatur primer. Sumber data sekunder yang didapat oleh peneliti yaitu melalui berbagai sumber, seperti literatur artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Definisi Konseptual

a) **Penanaman Modal dalam Negeri**

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) merupakan bagian dari kekayaan yang dimiliki masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda baik yang dimiliki negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang bertempat di Indonesia untuk diabdikan kepada pembangunan ekonomi nasional.

b) **Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Prof. Simon Kuznets (Jhingan, 2013) Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang dan jasa bagi penduduknya yang tercermin dengan adanya peningkatan output nasional secara kontinu dan diikuti dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi yang dibutuhkan.

c) **Tingkat Inflasi**

Menurut Bank Indonesia, Inflasi adalah suatu keadaan meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja belum bisa disebut inflasi, tetapi jika kenaikan itu juga terjadi pada barang lainnya maka bisa dikatakan terjadi inflasi. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

d) Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran Terbuka menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah pencari kerja yang masuk angkatan kerja (15 tahun ke atas), yang sedang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak memenuhi syarat dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja.

e) Pengeluaran Pemerintah

Menurut Suparmoko (2003) Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Artinya, semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah maka akan semakin banyak pula pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan.

f) Suku Bunga Kredit Investasi

Menurut Bank Indonesia, suku bunga kredit investasi adalah suku bunga yang dikenakan bagi (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru. Misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai dari kredit tersebut.

5. Definisi Operasional

a) Penanaman Modal dalam Negeri

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah realisasi PMDN yang terdiri dari realisasi PMDN pada semua sektor perekonomian di Jawa Tengah yang dinyatakan dalam milyar rupiah selama periode 2000-2016. Data PMDN diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

b) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan presentase kenaikan Produk Domestik Regional Bruto tanpa memandang kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan dalam struktur ekonomi periode 2000-2016 dalam satuan persen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Bruto Tahun Dasar 2000 diperoleh dari Jawa Tengah dalam angka edisi 1999-2017.

c) Tingkat Inflasi

Tingkat Inflasi dalam penelitian ini merupakan data tingkat inflasi tahunan Jawa Tengah periode 2000-2016, yang dinyatakan dalam satuan persen. Data tingkat inflasi diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

d) Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran Terbuka menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah orang yang masuk angkatan kerja (15 tahun ke atas) yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak memenuhi syarat dan pada waktu yang

bersamaan mereka tidak bekerja. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah tahun 2000-2016 yang dinyatakan dalam satuan persen.

e) **Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah adalah pembentukan modal bruto yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2000-2016 yang dinyatakan dalam satuan milyar rupiah. Data diperoleh dari Jawa Tengah dalam Angka edisi 1999-2017.

f) **Suku Bunga Kredit Investasi**

Suku Bunga Kredit Investasi dalam penelitian ini merupakan suku bunga pinjaman investasi bank umum di Jawa Tengah, yang dinyatakan dalam persen selama periode 2000-2016. Data tingkat suku bunga kredit investasi tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

B. Teknik Analisa Data

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis data terbagi menjadi 2 macam, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menilai objek penelitian berdasarkan sifat tertentu di mana dalam penilaian sifat ini dinyatakan tidak dalam angka-angka dan digunakan untuk menjelaskan analisis data yang diolah. Sedangkan analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Analisis regresi berganda (*Multivariate Regression*) merupakan suatu model dimana variabel terikat (dependen) tergantung pada dua atau lebih variabel

bebas (independen). Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Suliyanto, 2011)

Analisis regresi linier berganda merupakan salah satu metode dari metode OLS (*Ordinary Least Square*) yang mempunyai beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Asumsi tersebut adalah :

- 1) Semua penaksir tak bias linier atau penaksir OLS mempunyai varians minimum.
- 2) Varians dari tiap unsur *disturbance* e_i tergantung (*conditional*) pada nilai yang dipilih dari variabel yang menjelaskan merupakan angka konstan sama dengan σ^2 yang merupakan asumsi homoskedastisitas atau variansnya sama.
- 3) Tidak terjadi autokorelasi, artinya tidak ada korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (*time series*) atau seperti dalam data *cross sectional*.
- 4) Variabel yang menjelaskan adalah non stokastik. Yaitu variabel yang terdiri dari angka-angka yang tetap (*fixed*) dan e_i didistribusikan secara normal.
- 5) Tidak ada multikolinearitas antara variabel yang menjelaskan X.

Asumsi-asumsi tersebut adalah asumsi yang diperlukan agar penduga koefisien regresi bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) atau mempunyai sifat linier tidak bias (Gujarati, 2012).

Bentuk umum dari regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \cdots + \beta_k X_{ki} + e_i$$

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PMDN di Jawa Tengah ini menggunakan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pengeluaran Pemerintah dan Suku Bunga Kredit Investasi sebagai variabel independen dan realisasi PMDN di Jawa Tengah sebagai variabel dependen. Variabel-variabel tersebut kemudian di transformasikan ke dalam bentuk Logaritma Natural. Logaritma Natural digunakan dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini data-data yang diperoleh bervariasi dan memiliki satuan yang berbeda-beda sehingga digunakan alat analisis regresi berganda dengan logaritma natural (Insukindro, 2003). Dengan demikian, persamaan dalam penelitian ini dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

$$\text{Ln}Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 \text{Ln}X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

$\text{Ln}Y$ = Penanaman modal dalam negeri (Milyar Rupiah)

X_1 = Pertumbuhan ekonomi (persen)

X_2 = Tingkat inflasi (persen)

X_3 = Tingkat pengangguran terbuka (persen)

$\text{Ln}X_4$ = Pengeluaran pemerintah (Milyar Rupiah)

X_5 = Suku bunga kredit investasi (persen)

a = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi

β_2 = Koefisien regresi tingkat inflasi

β_3 = Koefisien regresi tingkat pengangguran terbuka

$\text{Ln}\beta_4$ = Elastisitas pengeluaran pemerintah

β_5 = Koefisien regresi suku bunga kredit investasi

e = Kesalahan gangguan

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi terdistribusi normal atau tidak, dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas. Dalam penelitian ini, uji normalitas akan menggunakan *Jarque-Bera (J-B) Test* dan metode grafik. Nilai residual terstandarisasi berdistribusi normal jika $J-B \text{ hitung} < \text{nilai } Chi \text{ Square tabel}$. (Gujarati, 2012)

b. Uji Multikolinearitas

Untuk menguji ada atau tidak ada korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas dalam model regresi yang dibuat, maka dalam penelitian ini menggunakan uji multikolinearitas. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan menggunakan metode *Auxillary Regresi*, caranya yaitu melihat nilai R^2 dan nilai r^2 . Apabila dari hasil pengujian statistik diperoleh $R^2 > r^2$ berarti tidak ada multikolinieritas, sedangkan jika $R^2 < r^2$ berarti ada multikolinieritas. (Gujarati, 2012)

c. Heteroskedastisitas

Untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu observasi ke observasi yang lain dalam model regresi maka dalam penelitian ini menggunakan uji heteroskedastisitas. Heterokedastisitas terjadi jika variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. (Suliyanto, 2011).

Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas menggunakan Uji *Glejser*. Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi linier yaitu

dengan melihat Nilai Prob. *F-statistic* (F hitung). H_0 diterima atau tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai Prob. F hitung lebih besar dibandingkan tingkat alpha 0,05 (5%), dan sebaliknya H_0 ditolak atau terjadi heteroskedastisitas jika nilai Prob. F hitung lebih kecil dari tingkat alpha 0,05 (5%).

d. Uji Autokorelasi

Untuk menguji apakah terjadi korelasi antar anggota serangkaian observasi dalam model regresi atau tidak, maka dalam penelitian ini menggunakan uji autokorelasi. Autokorelasi terjadi jika variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel yang pada periode lain atau variabel gangguan tidak acak. (Suliyanto, 2011).

Dalam penelitian ini, untuk memastikan apakah model regresi linier terbebas dari autokorelasi, menggunakan metode *Brusch-Godfrey* atau LM (*Lagrange Multiplier Test*). H_0 diterima atau tidak terjadi autokorelasi jika nilai Prob. F hitung lebih besar dibanding tingkat alpha 0,05 (5%), dan sebaliknya, H_0 ditolak atau terjadi autokorelasi jika nilai Prob. F hitung lebih kecil dibanding tingkat alpha 0,05 (5%). (Suliyanto, 2011)

3. Uji Statistik

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Untuk menguji ketepatan model (*goodness of fit*) dalam penelitian ini menggunakan Nilai F hitung. Uji F atau sering disebut juga uji simultan digunakan untuk menguji apakah variabel bebas secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan nilai variabel tergantung atau tidak. Kesimpulan bahwa model termasuk kategori cocok (*fit*) atau tidak, kita harus membandingkan nilai F hitung dengan

nilai F tabel dengan derajat kebebasan: df: α , (k-1), (n-k). Nilai F hitung dapat diperoleh dengan rumus: (Suliyanto, 2011).

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)}$$

Keterangan :

F = Nilai F hitung

n = Jumlah observasi

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel

Hipotesis yang digunakan adalah :

- 1) $H_0 : \beta_i = 0$ Variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan suku bunga kredit investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penanaman modal dalam negeri (PMDN) secara bersama-sama.
- 2) $H_1 : \beta_i \neq 0$ Semua variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan suku bunga kredit investasi atau minimal salah satu variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel penanaman modal dalam negeri (PMDN) secara bersama-sama.

Kriteria pengujian :

Menentukan daerah keputusan, yaitu daerah dimana hipotesa nol diterima atau tidak.

- 1) H_0 diterima apabila F hitung \leq F tabel, artinya semua variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan suku bunga kredit investasi secara bersama-sama bukan

merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel penanaman modal dalam negeri (PMDN) .

- 2) H_0 ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, artinya semua variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan suku bunga kredit investasi secara bersama-sama merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel penanaman modal dalam negeri (PMDN) .

b. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik t)

Untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat signifikan atau tidak secara statistik, maka dalam penelitian ini menggunakan uji signifikansi parameter individu atau uji statistik t (Gujarati, 2013). Dalam penelitian ini menggunakan uji t *one tailed* dengan $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan (*degree of freedom*) $df = n - k$, dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel. Uji t *one tailed* digunakan karena hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini telah menunjukkan arah pengujian, yaitu terdapat pengaruh positif atau negatif dari variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus uji t adalah sebagai berikut : (Suliyanto, 2011)

$$t_i = \frac{b_j}{Sb_j}$$

Keterangan:

t_i = Nilai t hitung

b = Koefisien regresi dari variabel bebas

Sb_j = Kesalahan baku koefisien regresi

Hipotesis dari uji t ini menurut Widarjono (2009) adalah:

- a) $H_0 : \beta_i = 0$, (tidak terdapat pengaruh secara signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen).
- b) $H_0 : \beta_i \neq 0$, (terdapat pengaruh secara signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen).

Kriteria pengujian dengan tingkat signifikansi 5% (Gujarati, 2013) :

- a) H_0 diterima jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau jika prob. $t_{hitung} \leq 5\%$
- b) H_0 ditolak jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau jika prob. $t_{hitung} \geq 5\%$

Hipotesis yang diuji pada uji statistik t adalah sebagai berikut :

- 1) $H_0 : \beta_i = 0$ = Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan suku bunga kredit investasi terhadap variabel penanaman modal dalam negeri (PMDN).
- 2) $H_1 : \beta_i \neq 0$ Ada pengaruh yang signifikan antara variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan suku bunga kredit investasi terhadap variabel penanaman modal dalam negeri (PMDN).

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinan adalah besarnya pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variabel terganggunya. Semakin tinggi koefisien determinasi, berarti semakin tinggi juga kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan perubahan pada variabel terganggunya. (Suliyanto, 2011).

Kelemahan dari koefisien determinan yaitu bersifat bias terhadap variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi, artinya jika terdapat penambahan satu variabel bebas dan peningkatan jumlah pengamatan dalam model, maka akan mengakibatkan nilai R^2 naik meskipun variabel yang ditambahkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantungnya. Koefisien determinasi yang telah disesuaikan atau Adjusted R square (R^2_{adj}) digunakan untuk mengurangi kelemahan tersebut. Rumus koefisien determinasi yang disesuaikan yaitu sebagai berikut : (Suliyanto, 2011)

$$R^2_{adj} = R^2 - \frac{P(1 - R^2)}{N - P - 1}$$

Keterangan :

R^2_{adj} = Koefisien determinasi yang disesuaikan
 N = Ukuran sampel
 P = Jumlah variabel bebas

4. Uji Koefisien Beta (β)

Pada model semi log dengan menggunakan logaritma natural (ln) seperti dalam penelitian ini, slope koefisien beta (β) dapat digunakan untuk mengukur elastisitas. Elastisitas ini menunjukkan presentase perubahan (*percentage change*) variabel dependen sebagai akibat persentase perubahan (*percentage change*) variabel independen.

Secara kalkulus elastisitas dirumuskan sebagai berikut : (Gujarati, 2012)

$$e = (dy/y)/(dx/x)$$

$$e = (dy/dx)/(x/y)$$

Keterangan :

Y = Variabel independen

X = Variabel dependen

Variabel independen yang memiliki nilai koefisien beta paling besar adalah variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap variabel dependen (Gujarati, 2012).

Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini setelah ditransformasi dalam bentuk Logaritma Natural (Ln) adalah sebagai berikut :

$$\text{Ln}Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 \text{Ln}X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

LnY = Penanaman modal dalam negeri (Milyar Rupiah)

X₁ = Pertumbuhan ekonomi (persen)

X₂ = Tingkat inflasi (persen)

X₃ = Tingkat pengangguran terbuka (persen)

LnX₄ = Pengeluaran pemerintah (Milyar Rupiah)

X₅ = Suku bunga kredit investasi (persen)

a = Konstanta

β₁ = Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi

β₂ = Koefisien regresi tingkat inflasi

β₃ = Koefisien regresi tingkat pengangguran terbuka

Lnβ₄ = Elastisitas pengeluaran pemerintah

β₅ = Koefisien regresi suku bunga kredit investasi

e = Kesalahan gangguan

Dari persamaan di atas dapat dibuktikan bahwa elastisitas dapat dilihat dari

koefisien beta (β), dengan persamaan sebagai berikut: (Gujarati, 2012)

$$\begin{aligned} E &= \left(\frac{dY}{Y} \right) / \left(\frac{dX}{X} \right) \\ &= \left(\frac{dY}{dX} \right) / \left(\frac{X}{Y} \right) \end{aligned}$$

Keterangan :

E = koefisien elastisitas

dY = perubahan pada variabel dependen

dX = perubahan pada variabel independen

Dengan demikian maka nilai koefisien beta dapat menjelaskan nilai elastisitas variabel, sehingga nilai tersebut dapat digunakan dalam menentukan variabel independen yang paling besar pengaruhnya terhadap variabel dependen (Gujarati, 2012).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Keadaan Geografis

a. Letak Geografis

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang terletak di tengah dua provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara astronomis, Jawa Tengah terletak antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari sisi barat ke timur adalah 263 km dan dari sisi utara ke selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa). Batas-batas wilayah Jawa Tengah adalah :

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : DI Yogyakarta dan Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Provinsi Jawa Barat

Sebelah Timur : Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi 35 daerah Kabupaten/Kota, yaitu 6 Daerah Kota dan 29 Daerah Kabupaten dengan 352 Kecamatan, yang meliputi 8.530 Desa dan 606 Kelurahan. Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa dan 1,70 persen dari luas Indonesia. Daerah dengan ilayah terluas yaitu Kabupaten Cilacap dengan luas 2.138,51 Km², dan daerah

dengan wilayah paling sempit adalah Kota Magelang dengan luas 18,12 Km². (Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2017)

2. Keadaan Penduduk

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi kependudukan di suatu daerah, yaitu kualitas, kuantitas, dan dinamika. Berdasarkan kualitas, artinya laju pertumbuhan penduduk tidak hanya dipengaruhi oleh struktur dan perubahan penduduk seperti jumlah balita, anak sekolah, angkatan kerja dan lansia, tetapi juga tingkat kelahiran, kematian, dan sebagainya. Secara kuantitas, persebaran penduduk di Indonesia masih berpusat di Pulau Jawa. Sedangkan berdasarkan dinamikanya, yaitu kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2000-2016 terus mengalami peningkatan seperti terlihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Penduduk Jawa Tengah Tahun 2000, 2010 dan 2016

| Keterangan | 2000 | 2010 | 2016 |
|---------------------------------------|--------|-------|-------|
| Jumlah (juta jiwa) | 30,78 | 32,38 | 34,02 |
| Laki-laki (juta jiwa) | 15,26 | 16,09 | 16,87 |
| Persentase (laki-laki) | 49,55 | 49,69 | 49,59 |
| Perempuan (juta jiwa) | 15,52 | 16,29 | 17,15 |
| Persentase (perempuan) | 49,63 | 50,31 | 50,41 |
| 10 tahun ke atas (juta jiwa) | 25,12 | 23,87 | 25,74 |
| Persentase (10 tahun ke atas) | 81,61 | 73,72 | 75,66 |
| 10 tahun ke bawah (juta jiwa) | 5,66 | 8,51 | 8,28 |
| Persentase (10 tahun ke bawah) | 18,39 | 26,28 | 24,34 |
| Kepadatan (jiwa per km ²) | 918,98 | 995 | 1045 |
| Pertumbuhan (persen) | 7,92 | 5,2 | 5,06 |
| Penduduk Pulau Jawa (juta jiwa) | 121,3 | 136,6 | 146,6 |

Sumber : Jawa Tengah dalam Angka (beberapa edisi)

Dari Tabel 4.1 di atas dapat diketahui jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2016 berdasarkan data Jawa Tengah dalam Angka 2017 adalah sebesar 34.019.095 jiwa. Jumlah ini setara dengan 23,21 persen penduduk Pulau Jawa. Laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya dari tahun 2010 sampai 2016 yaitu 0,0083, artinya terjadi pertumbuhan penduduk yang positif di Jawa Tengah tiap tahunnya.

Sedangkan dari tingkat kepadatan penduduk, pada tahun 2000 tingkat kepadatan penduduk 918,98 jiwa per km². Tahun 2010 nilainya naik menjadi 995 jiwa per km² dan pada tahun 2016 bertambah menjadi 1045 jiwa per km². Tingkat kepadatan penduduk idealnya yaitu 1000 jiwa per km², meskipun tingkat kepadatan penduduk di Jawa Tengah meningkat namun masih tergolong ideal. Fluktuasi penduduk tersebut diakibatkan adanya pertambahan dari pertumbuhan migrasi dari atau ke provinsi lain yang keluar masuk Provinsi Jawa Tengah.

3. Kondisi Perekonomian

Sistem ekonomi yang terbentuk di suatu daerah dapat mencerminkan bagaimana kondisi perekonomian di daerah tersebut. Salah satu indikator untuk menggambarkan sektor ekonomi di suatu daerah adalah distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral atas dasar harga konstan. Beberapa sektor unggulan di Jawa Tengah antara lain industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta konstruksi. Peranan PDRB dapat ditunjukkan dalam Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2 Peranan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Jawa Tengah Tahun 2015-2016 (persen)

| NO | LAPANGAN USAHA | 2015 | 2016 |
|--------------------------------|--|--------|--------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 14,11 | 13,69 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 1,99 | 2,24 |
| 3 | Industri Pengolahan | 35,27 | 34,88 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,11 | 0,11 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,07 | 0,07 |
| 6 | Konstruksi | 10,08 | 10,23 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 14,29 | 14,27 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 3,32 | 3,37 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 3,11 | 3,14 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 4,09 | 4,21 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,69 | 2,80 |
| 12 | Real Estate | 1,84 | 1,86 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,34 | 0,36 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2,75 | 2,67 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 3,63 | 3,72 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,78 | 0,82 |
| 17 | Jasa lainnya | 1,52 | 1,57 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | | 100,00 | 100,00 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 4.2 sektor industri pengolahan menyumbang persentase terbesar terhadap PDRB yaitu sebesar 35,27 persen pada tahun 2015 dan menjadi 34,88 persen pada tahun 2016. Hal ini terjadi karena terdapat peningkatan tren ekspor industri pengolahan non migas, seperti tekstil, *clothing*, dan *footwear* yang memiliki daya saing tinggi.

Dari sektor pariwisata yang menjadi unggulan adalah candi Borobudur di perbatasan Klaten dan Yogyakarta, pantai-pantai di Kebumen, Kota Pekalongan yang dijuluki sebagai Kota Batik merupakan sentra

industri garmen, industri meubel kayu di Jepara, dan sektor lainnya yang tersebar di Jawa Tengah.

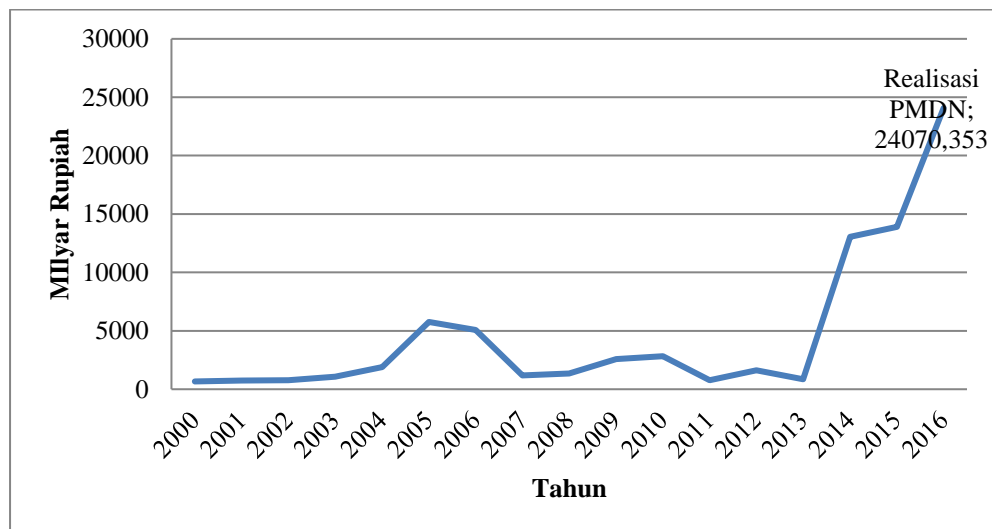
Realisasi investasi yang tinggi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif, setiap daerah akan berusaha menstabilkan keadaan perekonomiannya dan mempermudah akses pelayanan perizinan penanaman modal. Prinsipnya adalah dengan memberikan pelayanan yang prima, mudah, murah, cepat, transparan, dan akuntabel.

B. Gambaran Umum Variabel Penelitian

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Tujuan pembangunan ekonomi adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Tercapainya kesejahteraan tersebut dapat diukur dari bagaimana mana suatu negara atau wilayah dapat menyelesaikan berbagai masalah yang sedang dihadapi. Salah satu cara untuk mendukung pembangunan ekonomi yaitu melalui investasi. Investasi dibagi menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Dalam penelitian ini variabel PMDN adalah realisasi PMDN yang terdiri dari realisasi PMDN pada semua sektor perekonomian. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Tengah sejak tahun 2000 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut data realisasi PMDN di Jawa tengah tahun 2000-2016 :



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah

Grafik 4.1. Realisasi PMDN di Jawa Tengah tahun 2000-2016 (Miliar Rupiah)

Dari Grafik 4.1 dapat diketahui bahwa pertumbuhan investasi tertinggi dicapai pada tahun 2016 yaitu sebesar 15,53 persen, dari Rp. 13.890,062 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp. 24.070,353 Miliar di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa telah terciptanya kondisi yang mendukung bagi kegiatan investasi di Provinsi Jawa Tengah, seperti peningkatan pembangunan infrastruktur, deregulasi peraturan penanaman modal, serta hubungan industrial yang kondusif . Dalam beberapa kurun waktu, yaitu antara tahun 2007, 2011 dan 2013 nilai investasi mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya penurunan investasi di beberapa sektor unggulan seperti pertanian dan industri.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator ekonomi. PDRB menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Dalam penelitian ini untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, yaitu dengan menggunakan PDRB berdasarkan harga konstan 2010. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dari tahun 2000 hingga tahun 2010 berfluktuatif, namun PDRB semakin meningkat tiap tahunnya. Berikut data PDRB dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2000-2016 :

Tabel 4.3. Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Tahun 2000-2016 (Jutaan Rupiah)

| Tahun | Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010 | Pertumbuhan Ekonomi (Persen) |
|-------|---|---------------------------------|
| 2000 | 383.524.357,82 | 3,93 |
| 2001 | 396.297.141,33 | 3,33 |
| 2002 | 410.072.324,37 | 3,48 |
| 2003 | 430.495.932,42 | 4,98 |
| 2004 | 452.570.942,83 | 5,13 |
| 2005 | 476.772.101,17 | 5,35 |
| 2006 | 502.206.754,92 | 5,33 |
| 2007 | 530.294.905,93 | 5,59 |
| 2008 | 560.038.265,28 | 5,61 |
| 2009 | 588.830.900,66 | 5,14 |
| 2010 | 623.224.621,33 | 5,84 |
| 2011 | 656.268.129,91 | 5,30 |
| 2012 | 691.343.115,96 | 5,34 |
| 2013 | 726.655.118,06 | 5,11 |
| 2014 | 764.959.150,95 | 5,27 |
| 2015 | 806.775.362,19 | 5,47 |
| 2016 | 849.383.564,59 | 5,28 |

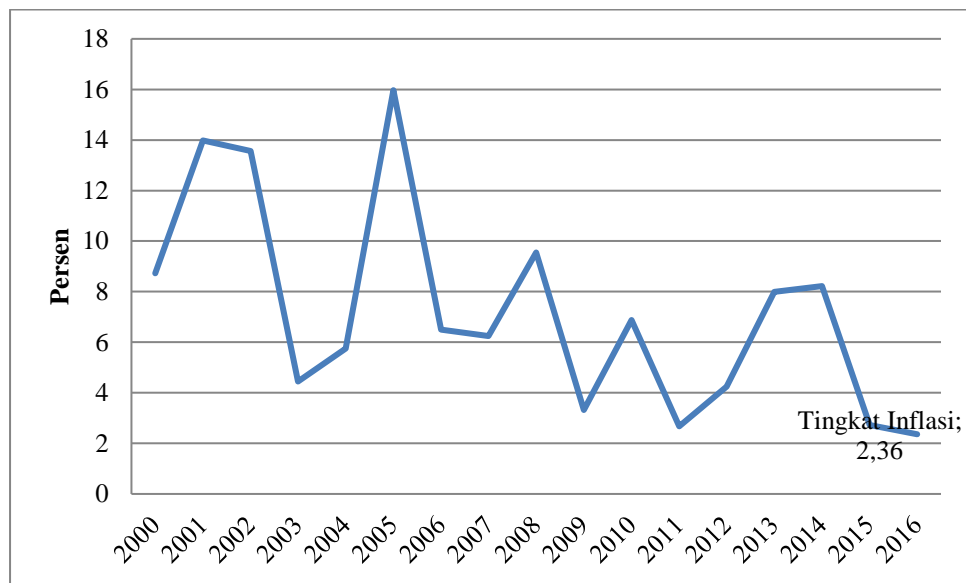
Sumber : Data diolah berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah mengalami perubahan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Selama tahun pengamatan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah rata-rata mencapai 5,03 persen dengan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi yaitu pada tahun 2010 sebesar 5,84 persen atau naik sebesar 34.393.720,67 juta rupiah dan yang paling rendah yaitu pada tahun 2001 sebesar 3,33 persen atau naik sebesar 12.772.783,51 juta rupiah. Penurunan ini disebabkan karena inflasi yang kembali naik mencapai 13,98 setelah sempat turun pada tahun 1999-2000 sejak krisis moneter tahun 1997-1998.

3. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas ekonomi yang mencerminkan perubahan harga di suatu daerah. Di Jawa Tengah, laju inflasi sebagian besar dipengaruhi karena adanya perubahan harga berdasarkan kebijakan pemerintah, misalnya perubahan harga BBM, perubahan tarif listrik dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, tingkat inflasi yang digunakan merupakan data tingkat inflasi tahunan Jawa Tengah periode tahun 2000-2016, yang dinyatakan dalam persen. Tingkat inflasi tahunan di Jawa Tengah pada periode 2000 – 2016 cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya. Perkembangan tingkat inflasi di Jawa Tengah dapat dilihat pada Grafik 4.2 berikut ini :



Sumber : Jawa Tengah dalam Angka (beberapa edisi)

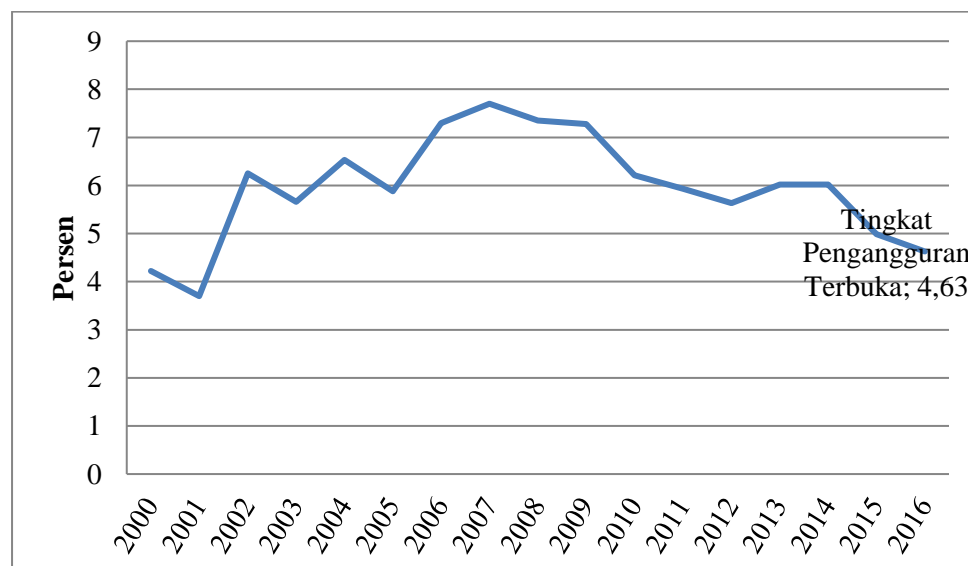
Grafik 4.2. Tingkat Inflasi di Jawa Tengah tahun 2000-2016 (Persen)

Perkembangan tingkat inflasi tahunan yang terjadi di Jawa Tengah pada periode 2000-2016 dapat dilihat pada Grafik 4.2. Perkembangan tingkat inflasi pada periode ini menunjukkan kecenderungan untuk berfluktuasi. Inflasi di Jawa Tengah mengalami titik tertingginya pada tahun 2005 di mana inflasi yang terjadi mencapai besaran 15,97 persen, hal ini terjadi sebagai akibat kebijakan kenaikan harga BBM oleh pemerintah. Dapat dilihat bahwa setelah tahun 2005 tingkat inflasi mulai menurun. Sampai tahun 2016, tingkat inflasi mengalami penurunan yang signifikan sehingga inflasi berada pada titik terendahnya, yaitu sebesar 2,36 persen, hal ini terjadi akibat penurunan harga barang dan jasa. Inflasi yang rendah juga merupakan dampak diterapkannya berbagai kebijakan pemerintah daerah Jawa Tengah seperti Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi (Sihati) sehingga kenaikan harga dapat terpantau stabil

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Dalam pembangunan perekonomian, untuk mendukung pembangunan ekonomi di masa yang akan datang diperlukan sumberdaya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Angkatan kerja menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Sedangkan pengangguran terbuka adalah pencari kerja (berusia 15 tahun ke atas) yang sedang mempersiapkan suatu usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah dalam periode tahun 2000-2016 terus mengalami penurunan. Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah dapat dilihat dalam Grafik 4.3 berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Grafik 4.3. Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah tahun 2000-2016 (Persen)

Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Grafik 4.3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah pengangguran terbuka cenderung mengalami fluktuasi tiap tahunnya namun secara keseluruhan mengalami penurunan pada tahun-tahun sekarang. Sejak periode tahun 2000-2016, pada tahun 2007 tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah mencapai angka tertinggi yaitu 7,7 persen atau tumbuh 5,48 persen dari tahun 2006 yaitu 7,3 persen. Setelah tahun 2007 tingkat pengangguran terbuka semakin berkurang, hal ini terjadi karena banyaknya tenaga kerja yang masuk ke sektor pertanian dan sektor informal, yang mana cakupan kerjanya luas sehingga penyerapan tenaga kerjanya juga banyak.

5. Pengeluaran Pemerintah

Adanya otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai prakarsa sendiri dan berdasarkan aspirasi masyarakat. Kenaikan pengeluaran pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan publik yang ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik akan meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut.

Dalam penelitian ini, pengeluaran pemerintah adalah pembentukan modal bruto yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2000-2016. Pengeluaran pemerintah di provinsi Jawa Tengah dari tahun 2000 hingga tahun 2016

mengalami peningkatan tiap tahunnya. Perkembangannya ditunjukkan dalam Tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4. Pembentukan Modal Bruto Jawa Tengah Tahun 2000-2016 (Jutaan Rupiah)

| Tahun | Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010 | Pertumbuhan |
|-------|---|-------------|
| 2000 | 98.052.776,24 | 6,10 |
| 2001 | 86.787.668,32 | -11,48 |
| 2002 | 89.995.059,14 | 3,69 |
| 2003 | 96.584.971,61 | 7,32 |
| 2004 | 109.590.496,61 | 13,46 |
| 2005 | 119.530.574,50 | 9,07 |
| 2006 | 134.945.529,41 | 12,89 |
| 2007 | 142.594.689,40 | 5,66 |
| 2008 | 152.139.502,13 | 6,69 |
| 2009 | 160.692.280,52 | 5,62 |
| 2010 | 173.533.501,91 | 7,99 |
| 2011 | 186.722.240,15 | 7,60 |
| 2012 | 202.328.210,65 | 8,35 |
| 2013 | 211.220.465,24 | 4,39 |
| 2014 | 220.772.866,07 | 4,52 |
| 2015 | 232.078.808,27 | 5,12 |
| 2016 | 245.915.967,69 | 5,96 |

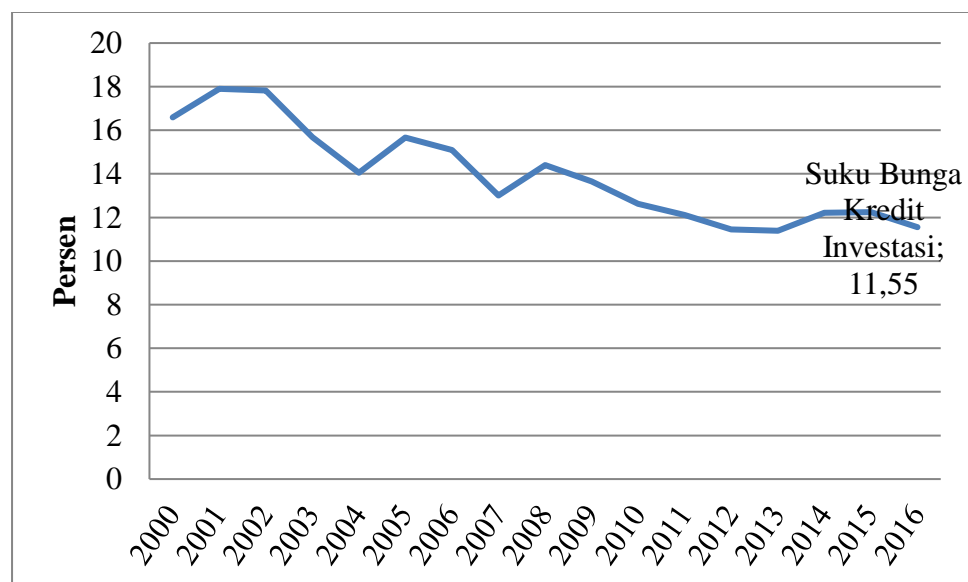
Sumber : Data olahan berdasarkan Jawa Tengah dalam Angka beberapa edisi

Perkembangan pengeluaran pemerintah Jawa Tengah pada periode 2000-2016 dapat dilihat pada Tabel 4.4. Perkembangan pengeluaran pemerintah pada periode ini menunjukkan cenderung meningkat setiap tahunnya. Pengeluaran pemerintah tiap tahunnya rata-rata bertambah sebesar 6,05 persen. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan daerah. Terbukti dengan pembangunan kawasan industri, pembangunan jalan tol trans Jawa, pembangunan pelabuhan Tanjung Emas dan pembangunan lainnya.

6. Suku Bunga Kredit Investasi

Tinggi rendahnya tingkat suku bunga kredit investasi menjadi penyebab utama adanya kendala pembiayaan dalam kegiatan usaha sehingga memperlemah keberadaan sektor riil seperti pertanian, pertambangan, industri dan pariwisata. Melemahnya sektor riil akan berdampak pada minat penanaman modal.

Suku bunga kredit investasi dalam penelitian ini merupakan suku bunga yang dikenakan bagi (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan atauoun pendirian proyek baru. Tingkat suku bunga kredit investasi di Jawa Tengah selama periode tahun 2000-2016 terus mengalami penurunan, yang dapat dijelaskan dalam Grafik 4.4 berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Grafik 4.4. Tingkat Suku Bunga Kredit Investasi Kategori Bank Umum di Jawa Tengah tahun 2000-2016 (Persen)

Berdasarkan Grafik 4.4 dapat diketahui bahwa perkembangan suku bunga kredit investasi pada bank umum mengalami penurunan tiap tahunnya. Tingkat suku bunga kredit yang terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 11,55 persen. Suku bunga kredit perbankan menurun seiring dengan adanya kebijakan pembatasan suku bunga deposito serta kebijakan instrumen baru *7-days Repo Rate*. Sedangkan tingkat suku bunga kredit yang tertinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 17,9 persen. Kenaikan ini disebabkan adanya kebijakan moneter Bank Indonesia yang meningkatkan tingkat suku bunganya untuk memberi ruang yang lebih besar agar laju pertumbuhan uang beredar turun setelah krisis moneter 1998.

C. Analisis Data

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan suku bunga kredit investasi dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat analisis *Eviews 8.0*. Penelitian ini menggunakan data *time series* di Provinsi Jawa Tengah selama periode waktu 17 tahun dari tahun 2000-2016. Model regresi dapat dijelaskan dengan output dan persamaan sebagai berikut :

Tabel 4.5 Output Hasil Regresi Linier Berganda Data *Time Series*

| Variabel | Koefisien | t-Statistik | Prob. | t tabel |
|----------|-----------|-------------|--------|---------|
| C | -59,11548 | -2,577366 | 0,0636 | 1,782 |
| X1 | 1,174534 | 2,062109 | 0,7013 | |
| X2 | -0,028777 | -0,393668 | 0,2651 | |
| X3 | -0,294081 | -1,174225 | 0,0170 | |
| X4 | 4,983872 | 2,809599 | 0,0357 | |
| X5 | 0,832821 | 2,391982 | 0,0257 | |

Sumber : Output Eviews 8, data diolah

$$F \text{ hitung} = 3.639198$$

$$R^2 = 0,62$$

$$\text{Adj } R^2 = 0,45$$

$$N = 102$$

$$\alpha = 0,05$$

Persamaan Regresi Linier Berganda :

$$Y = - 59,11548 + 1,174534 X_1 - 0,028777 X_2 - 0,294081 X_3 + 4,983872 X_4 + 0,832821 X_5 + e$$

Keterangan :

Y = Penanaman Modal Dalam Negeri

X₁ = Pertumbuhan Ekonomi

X₂ = Tingkat Inflasi

X₃ = Tingkat Pengangguran Terbuka

X₄ = Pengeluaran Pemerintah

X₅ = Suku Bunga Kredit Investasi

e = error

2. Uji Asumsi Klasik

Analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan tingkat suku bunga kredit investasi terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Tengah.

a. Uji Normalitas

Tujuan digunakannya uji normalitas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah residual yang diteliti terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian normalitas menggunakan analisis *Jarque-Bera (J-B) Test*. Tabel 4.6 menunjukkan hasil uji normalitas dengan analisis *Jarque-Bera (J-B) Test*.

Tabel 4.6 Output Uji Normalitas dengan *Jarque-Bera (J-B) Test*

| | <i>Unstandarized Residual</i> |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <i>Jarque-Bera (J-B) Test</i> | 0,218 |
| <i>Chi Square tabel</i> | 26,296 |
| <i>a. Test distribution is normal</i> | |

Sumber : Output *Eviews 8.0*, data diolah

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai *Jarque-Bera (J-B) Test* sebesar 0,218 lebih kecil dari nilai *Chi-Square* tabel yaitu 26,296 . Dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam model penelitian terbukti terdistribusi normal, sehingga layak untuk menggunakan teknik analisis regresi.

b. Uji Multikolinearitas

Untuk menguji ada tidaknya korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas dalam model regresi yang dibuat, maka dilakukan

uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas menggunakan metode *Auxillary* Regresi, caranya yaitu melihat nilai R^2 dan nilai r^2 . Apabila dari hasil pengujian statistik diperoleh $R^2 > r^2$ berarti tidak terdapat multikolinieritas, sedangkan jika $R^2 < r^2$ berarti terdapat multikolinieritas.

Tabel 4.7. Output Uji Multikolinearitas dengan Korelasi Parsial

| Variabel Model | <i>R Square</i> | <i>Correlation Partial</i> | Keterangan |
|------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|
| Pertumbuhan Ekonomi | 0,623 | 0,542 | Bebas Multikolinearitas |
| Tingkat Inflasi | | 0,507 | Bebas Multikolinearitas |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | | 0,431 | Bebas Multikolinearitas |
| Pengeluaran Pemerintah | | 0,352 | Bebas Multikolinearitas |
| Suku Bunga Kredit Investasi | | 0,422 | Bebas Multikolinearitas |

Sumber : Output *Eviews* 8.0, data diolah

Berdasarkan Tabel 4.7 terlihat bahwa berdasarkan nilai koefisien determinasi (R^2) secara keseluruhan lebih besar dari nilai koefisien korelasi parsial untuk variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah, dan suku bunga kredit investasi terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam variabel-variabel tersebut tidak terdapat multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas

Untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu observasi ke observasi yang lain dalam model regresi maka dilakukan uji heterokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas menggunakan Uji

Glejser. Dikatakan tidak terdapat heterokedastisitas jika nilai probabilitas dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,05 (5 persen).

Tabel 4.8. Output Uji Heterokedastisitas dengan menggunakan Uji *Glejser*

| Variabel Model | Koefisien | Tingkat Signifikansi |
|------------------------------|-----------|----------------------|
| Pertumbuhan Ekonomi | -0.018730 | 0.9542 |
| Tingkat Inflasi | 0.022742 | 0.5891 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | -0.000715 | 0.9960 |
| Pengeluaran Pemerintah | -0.347512 | 0.7327 |
| Suku Bunga Kredit Investasi | -0.144049 | 0.4748 |

Sumber : Output *Eviews* 8.0, data diolah

Berdasarkan output Tabel 4.8 di atas, berdasarkan uji *Glejser* dapat diketahui bahwa nilai probabilitas pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah, suku bunga kredit investasi $> 0,05$. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Untuk menguji apakah terjadi korelasi antar anggota serangkaian observasi dalam model regresi atau tidak, maka dalam penelitian ini menggunakan uji autokorelasi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan menggunakan metode *Brusch-Godfrey* atau LM (*Lagrange Multiplier Test*). Tidak terjadi autokorelasi jika nilai Prob. F hitung lebih besar dibanding tingkat alpha 0,05 (5 persen).

Tabel 4.9. Output Uji Autokorelasi dengan Menggunakan Metode *Brusch-Godfrey* atau LM (*Lagrange Multiplier Test*)

| | <i>Unstandadrized Residual</i> |
|----------------|--------------------------------|
| Prob. F hitung | 0,5498 |
| <i>Alpha</i> | 0,05 |

Sumber : Output *Eviews* 8.0, data diolah

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas dengan menggunakan metode *Brusch-Godfrey* atau LM (*Lagrange Multiplier Test*) dapat diketahui bahwa nilai Prob. F hitung $0,5498 > 0,05$. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa nilai residual terstandarisasi tersebar secara normal dan tidak terdapat autokorelasi.

3. Uji Statistik

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Untuk menguji ketepatan model (*goodness of fit*) dalam penelitian ini menggunakan Nilai F hitung. Uji F atau sering disebut juga uji simultan digunakan untuk menguji apakah variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan suku bunga kredit investasi secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan nilai variabel tergantung yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Tengah atau tidak. Nilai Uji F statistik dapat dijelaskan dalam Tabel 4.10 berikut :

Tabel 4.10. Output Hasil Regresi Data *Time Series* Uji F

| | |
|--------------------|------------|
| Nilai F statistik | 3,639198 |
| Prob (F statistik) | 0,034572 |
| Signifikansi | Signifikan |

Sumber : Output *Eviews* 8, data diolah

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan, nilai F hitung sebesar $(3,639198) > F$ tabel $(3,204)$. Nilai signifikansi sebesar $0,034572 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan suku bunga kredit investasi secara bersama-

sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Tengah, atau dapat pula dinyatakan bahwa model regresi yang terbentuk tepat atau cocok (*fit*).

b. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara individu/parsial dari masing-masing variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan suku bunga kredit investasi terhadap variabel terikat yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan α (*alpha*) = 0,05 atau tingkat kepercayaannya 95 persen, sehingga dapat diperoleh nilai t tabel sebesar 1,782. Jika probabilitas t hitung lebih besar dari 1,782 artinya terdapat pengaruh signifikan secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Begitu pula sebaliknya, jika probabilitas t hitung lebih kecil dari 1,782 artinya tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil analisis dan ringkasan hasil pengolahan data, nilai t hitung variabel bebas dijelaskan dalam Tabel 4.11 berikut :

Tabel 4.11 Nilai t Hitung Variabel Bebas

| Variabel | t-hitung | t-tabel | Kesimpulan |
|------------------|----------|---------|------------------------------|
| Pertumbuhan Ek. | 2,062 | 1,782 | Berpengaruh Signifikan |
| Tingkat Inflasi | -0,394 | 1,782 | Tidak Berpengaruh Signifikan |
| TPT | -1,174 | 1,782 | Tidak Berpengaruh Signifikan |
| Pengeluaran Pem. | 2,810 | 1,782 | Berpengaruh Signifikan |
| SBK Investasi | 2,392 | 1,782 | Berpengaruh Signifikan |

Sumber : Output Eviews 8, data diolah

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinan (R^2) digunakan secara umum untuk mengukur besarnya kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. Nilai R^2 yang mendekati angka satu artinya semua variabel independen di dalam model tersebut dapat variasi dari variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas dan masih terdapat variabel-variabel yang dapat menjelaskan variasi variabel dependen selain di dalam model tersebut. Dalam penelitian ini nilai yang digunakan adalah Adjusted R^2 , karena variabel independen yang digunakan lebih dari dua variabel. Berdasarkan hasil analisis menggunakan *Eviews* 8.0, diperoleh nilai Adj R^2 sebesar 0,451. Artinya, 45,1 persen variasi nilai PMDN di Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan suku bunga kredit investasi. Sedangkan selebihnya, 54,9 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian

ini seperti infrastruktur, PDRB, kebijakan otonomi daerah, dan lain sebagainya.

4. Intepretasi Hasil dan Pembahasan

Interpretasi hasil regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan suku bunga kredit investasi terhadap penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jawa Tengah tahun 2000-2016 yaitu sebagai berikut :

a. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap PMDN

Berdasarkan hasil uji t, bahwa $t \text{ hitung } |2,062| > t \text{ tabel } (1,782)$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PMDN di Jawa Tengah. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif yaitu sebesar 1,174, yang artinya bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen akan menambah jumlah PMDN sebesar 1,174 persen. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai PMDN di Jawa Tengah dikarenakan investasi merupakan salah satu faktor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Agar mengalami pertumbuhan yang pesat maka setiap perekonomian haruslah menabung dan menginvestasikan sebanyak mungkin bagian dari GNP-nya. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami peningkatan maka akan terjadi peningkatan kesempatan kerja, kesejahteraan, produktivitas dan distribusi pendapatan. Dalam teori klasik dengan model pertumbuhan Harrod-Domar, untuk memicu

pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan netto terhadap cadangan atau stok modal. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap PMDN dapat digambarkan dalam Tabel 4.12 berikut ini :

Tabel 4.12. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap PMDN di Jawa Tengah Tahun 2010-2015

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi (Persen) | PMDN (Milyar Rupiah) |
|-----------|---------------------------------|-------------------------|
| 2011 | 5,30 | 775,83 |
| 2012 | 5,34 | 1.633,95 |
| 2013 | 5,11 | 859,09 |
| 2014 | 5,27 | 13.061,19 |
| 2015 | 5,47 | 13.890,06 |
| Rata-Rata | 5,30 | 6.044,02 |

Sumber : Data olahan berdasarkan Jawa Tengah dalam Angka beberapa edisi

Dari Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa dari tahun 2011 hingga 2015 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari rata-rata pertahunnya 5,30 persen naik 3,14 persen menjadi 5,47 persen pada tahun 2016. PMDN juga mengalami peningkatan dari rata-rata pertahunnya 6.044,02 Milyar Rupiah naik 56,49 persen menjadi 13.890,06 Milyar Rupiah pada tahun 2015. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Triaryati (2015) dan Thirafi (2013) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Investasi asing langsung di Indonesia.

b. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap PMDN di Jawa Tengah

Berdasarkan hasil uji t, bahwa $t \text{ hitung } |0,393| < t \text{ tabel } (1,782)$ dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya, variabel tingkat inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap PMDN di Jawa Tengah.

Hasil ini sesuai dengan teori *return ratio*, jika tingkat inflasi tinggi maka pengembalian atas investasi (*return*) akan berkurang. Pada saat inflasi, harga-harga akan naik sehingga daya beli masyarakat akan berkurang. Berkurangnya daya beli masyarakat ini akan berdampak pada berkurangnya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan sehingga investor tidak ingin menanamkan modalnya. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya nilai investasi. Pengaruh negatif inflasi terhadap PMDN di Jawa Tengah dapat digambarkan dalam Tabel 4.13 berikut :

Tabel 4.13. Pengaruh Inflasi Terhadap PMDN di Jawa Tengah Tahun 2010-2015

| Tahun | Inflasi (Persen) | PMDN (Milyar Rupiah) |
|-----------|---------------------|-------------------------|
| 2011 | 2,68 | 775,83 |
| 2012 | 4,24 | 1.633,95 |
| 2013 | 7,99 | 859,09 |
| 2014 | 8,22 | 13.061,19 |
| 2015 | 2,73 | 13.890,06 |
| 2016 | 2,36 | 24.070,35 |
| Rata-rata | 4,70 | 9.048,41 |

Sumber : Jawa Tengah dalam Angka (beberapa edisi)

Dari Tabel 4.13 di atas, dapat diketahui bahwa tingkat inflasi dari tahun 2011 hingga 2016 turun sebesar 99,29 persen dari rata-rata tiap tahunnya yaitu 4,70 persen menjadi 2,36 persen pada tahun 2016. PMDN juga mengalami peningkatan sebesar 60,41 persen dari rata-rata tiap tahunnya yaitu 9.048,41 Milyar Rupiah menjadi 13.890,06 Milyar Rupiah pada tahun 2016. Dalam penelitian ini tingkat inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PMDN di Jawa Tengah karena tingkat inflasi di Jawa Tengah masih dibawah angka 10 persen per tahun atau masih

termasuk inflasi ringan. Artinya, jika tingkat inflasi ringan namun masih dibawah bunga yang diperoleh dari investasi maka hal ini tidak akan mempengaruhi investasi, karena investor masih tetap mendapatkan keuntungan. Namun, jika inflasi lebih tinggi daripada bunga investasi maka investor akan mengalami kerugian.

Hasil penenelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu milik Ni Made Krisna Marsela (2014) yang menyatakan bahwa variabel tingkat inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah investasi di Bali.

c. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap PMDN di Jawa Tengah

Berdasarkan hasil uji t, bahwa $t \text{ hitung } |1,174| < t \text{ tabel } (1,782)$ dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya, variabel tingkat pengangguran terbuka secara parsial tidak berpengaruh terhadap PMDN di Jawa Tengah.

Hasil ini tidak sesuai dengan teori neoklasik yang mengasumsikan bahwa pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga pasar (*price taker*) sehingga pengusaha hanya dapat mengatur jumlah tenaga kerja untuk meningkatkan output (Arfida, 2003). Dengan adanya penurunan jumlah pengangguran terbuka akan menyebabkan investasi bertambah. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah tingkat pengangguran terbuka, karena jumlah tenaga kerja yang tersedia dapat di dilihat berdasarkan tingkat pengangguran terbuka.

Hubungan negatif TPT terhadap PMDN di Jawa tengah disebabkan karena dengan adanya investasi akan meningkatkan kegiatan produksi sehingga akan membuka kesempatan kerja baru. Selanjutnya dengan adanya kesempatan kerja baru maka akan menyebabkan berkurangnya jumlah pengangguran. Ini berarti jika tingkat investasi naik maka TPT akan turun. Investasi di Jawa Tengah lebih banyak di sektor industri. Berikut data investasi menurut jenis industri di Jawa Tengah :

Tabel 4.14 Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Jawa Tengah 2011–2016

| Tahun | Penyerapan Tenaga Kerja | | | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| | PMA (Jiwa) | Pertumbuhan (Persen) | PMDN (Jiwa) | Pertumbuhan (Persen) |
| 2011 | 26.258 | 88,79 | 24.077 | 66,16 |
| 2012 | 23.353 | -11,06 | 21.971 | -8,74 |
| 2013 | 34.250 | 46,66 | 19.341 | -11,97 |
| 2014 | 25.011 | -26,97 | 13.072 | -32,41 |
| 2015 | 73.292 | 193,03 | 42.269 | 223,35 |
| 2016 | 125.204 | 70,82 | 50.008 | 18,3 |
| Jumlah | 321.276 | | 185.228 | |
| Rata-rata | 51.228 | 60,21 | 28.456 | 42,44 |

Sumber : Jawa Tengah dalam Angka (beberapa edisi)

Dari Tabel 4.14 di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2011 sampai 2016 pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dari PMDN yaitu 42,44 persen per tahun dan PMA sebesar 60,21 persen per tahun. TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap PMDN di Jawa Tengah karena investasi yang ditanamkan di Jawa Tengah sebagian bersifat padat modal sedangkan tingkat pendidikan tenaga kerjanya kebanyakan masih rendah. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 di Jawa Tengah tingkat pendidikan dari total pengangguran terbuka sebanyak 863.783

jiwa, yang belum menempuh pendidikan dasar minimal 12 tahun sebesar 43,63 persen dan selebihnya yang sudah menempuh yaitu 56,36 persen. Hal ini menyebabkan ketersediaan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap kenaikan PMDN di Jawa Tengah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu milik Wijayanti dan Yusuf (2011) yang menyatakan bahwa ketersediaan tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap investasi industri di Kota Semarang.

d. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PMDN di Jawa Tengah

Berdasarkan hasil uji t, bahwa $t \text{ hitung } |2,809| > t \text{ tabel } (1,782)$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, variabel pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PMDN di Jawa Tengah. Variabel pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif yaitu sebesar 4,983, yang artinya bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar satu persen akan menambah jumlah PMDN sebesar 4,983 persen.

Hasil ini sesuai dengan teori Wagner, yang menyatakan bahwa salah satu hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat adalah untuk pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi suatu daerah membaik maka akan menarik para investor untuk menanamkan modalnya. Karena semakin banyak pengeluaran pemerintah untuk peningkatan pembangunan, maka akan meningkatkan pendapatan dan memperlancar usaha para investor. Sehingga nilai investasi di daerah tersebut akan meningkat. Berikut data PDRB Jawa

Tengah tahun 2015-2016 menurut harga konstan 2010 berdasarkan pengeluaran :

Tabel 4.15. PDRB Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)

| JENIS PENGELUARAN | Tahun | | Rata-Rata (Persen) | Proporsi Persen) |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| | 2015 | 2016 | | |
| Konsumsi Rumah Tangga | 485.950.878,04 | 508.182.390,63 | 497.066.634,34 | 60,03 |
| Konsumsi LNPRT | 8.047.359,33 | 8.498.966,46 | 8.273.162,89 | 1,00 |
| Konsumsi Pemerintah | 58.743.644,32 | 57.739.336,02 | 58.241.490,17 | 7,03 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 232.078.808,27 | 245.915.967,69 | 238.997.387,98 | 28,86 |
| Perubahan Inventori | 4.703.069,34 | 5.226.765,59 | 4.964.917,47 | 0,60 |
| Ekspor Luar Negeri | 68.716.855,83 | 67.192.543,93 | 67.954.699,88 | 8,21 |
| Impor Luar Negeri | 99.500.274,23 | 85.080.176,80 | 92.290.225,52 | 11,15 |
| Net Ekspor Antar Daerah | 48.035.021,29 | 41.707.771,07 | 44.871.396,18 | 5,42 |
| TOTAL PDRB | 806.775.362,19 | 849.383.564,59 | 828.079.463,39 | 100,00 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Dari Tabel 4.15 dapat diketahui bahwa di Jawa Tengah pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembentukan modal bruto prosentasenya paling besar kedua yaitu 28,86 persen setelah pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 60,03 persen dari total PDRB. Pengeluaran pemerintah sebagian besar digunakan untuk konsumsi tetapi sebagian besarnya lagi digunakan sebagai pembentukan modal tetap untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang perekonomian. Sehingga banyak menarik investor dalam negeri untuk berinvestasi di Jawa Tengah. Dalam penelitian ini pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap PMDN di Jawa Tengah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu milik Prihatiningsih dan Wantara (2014) yang

menyatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah investasi di Indonesia.

e. Pengaruh Suku Bunga Kredit Investasi terhadap PMDN di Jawa Tengah

Berdasarkan hasil uji t, bahwa $t \text{ hitung } |2,391| > t \text{ tabel } (1,782)$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, variabel suku bunga kredit investasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PMDN di Jawa Tengah. Variabel suku bunga kredit investasi memiliki pengaruh positif yaitu sebesar 0,832, yang artinya bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar satu persen akan menambah jumlah PMDN sebesar 0,832 persen.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori klasik, yang menyebutkan jika suku bunga tinggi maka keinginan pemilik modal untuk berinvestasi akan berkurang karena pada saat suku bunga tinggi, keuntungan dari meningkatnya bunga lebih menarik pemilik modal untuk menabungkan dananya daripada meminjam dana untuk investasi. Hal ini terjadi karena pergerakan suku bunga kredit investasi tidak diikuti oleh pergerakan suku bunga kredit bank lain selain bank umum di Jawa Tengah. Selain itu, tingkat pengembalian modal yang dinikmati oleh pemilik modal masih lebih besar atau sama dengan tingkat suku bunga yang harus dibayar pemilik modal ke bank. Sehingga menyebabkan meningkatnya suku bunga kredit investasi berpengaruh positif terhadap PMDN di Jawa Tengah. Berikut data suku bunga kredit bank umum di Jawa Tengah berdasarkan jenis kreditnya :

Tabel 4.16. Suku Bunga Kredit Bank Umum di Jawa Tengah tahun 2012-2016 (persen)

| Jenis Kredit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kredit Modal Kerja | 11,81 | 11,66 | 12,60 | 12,67 | 11,89 |
| Kredit Investasi | 11,45 | 11,39 | 12,21 | 12,24 | 11,55 |
| Kredit Konsumsi | 12,12 | 11,80 | 12,32 | 12,52 | 11,48 |

Sumber : Bank Indonesia

Dari Tabel 4.16 di atas dapat diketahui bahwa suku bunga kredit investasi lebih rendah yaitu dengan rata-rata per tahun 11,77 persen dibandingkan suku bunga kredit modal kerja dengan rata-rata 12,12 persen per tahun dan kredit konsumsi 12,05 per tahun. Tingkat suku bunga kredit investasi berpengaruh secara signifikan terhadap PMDN di Jawa Tengah karena suku bunga suku bunga kredit investasi lebih rendah dibandingkan kredit modal kerja dan kredit konsumsi. Oleh karena itu meskipun tingkat suku bunganya tinggi, tetapi investasi tetap meningkat. Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu milik Septifany, *et al* (2014) yang menyatakan bahwa variabel suku bunga SBI berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah investasi di Indonesia.

5. Uji Koefisien Beta (β)

Untuk mengukur elastisitas dalam penelitian ini digunakan uji koefisien beta. Elastisitas ini menunjukkan persentase perubahan (*percentage change*) variabel dependen yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagai akibat persentase perubahan (*percentage change*) variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan suku bunga kredit investasi.

Variabel independen yang mempunyai nilai koefisien beta paling besar merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap variabel dependen, tetapi jika variabel tidak signifikan meskipun koefisiennya paling besar tidak diikutsertakan (Gujarati, 2012). Variabel yang paling berpengaruh dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.17. Output Hasil Regresi Linier Berganda untuk Uji Elastisitas

| Variabel | Koefisien Elastisitas |
|-----------------------------|-----------------------|
| Pertumbuhan Ekonomi | 1.174 |
| Pengeluaran Pemerintah | 4,984 |
| Suku Bunga Kredit Investasi | 0,833 |

Sumber : Output *Eviews* 8.0, data diolah

Berdasarkan hasil uji elastisitas pada Tabel 4.17 dapat diketahui bahwa variabel yang paling berpengaruh adalah variabel pengeluaran pemerintah, karena variabel pengeluaran pemerintah memiliki koefisien yang paling besar dibandingkan variabel lain yaitu sebesar 4,984.

Tabel 4.18. Perbandingan Pertumbuhan Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Suku Bunga Kredit Investasi di Jawa Tengah Tahun 2011-2016 (Persen)

| Tahun | PMDN (Milyar Rupiah) | Pertumbuhan | | |
|-----------|----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | Pertumbuhan Ekonomi | Pengeluaran Pemerintah | Suku Bunga Kredit Investasi |
| 2011 | 775,83 | -9,23 | 7,60 | -4,04 |
| 2012 | 1633,95 | 0,80 | 8,36 | -5,45 |
| 2013 | 859,09 | -4,43 | 4,39 | -0,52 |
| 2014 | 13061,19 | 3,20 | 4,52 | 7,20 |
| 2015 | 13890,06 | 3,70 | 5,12 | 0,25 |
| 2016 | 24070,35 | 3,39 | 5,96 | -5,64 |
| Rata-rata | 9048,41 | -0,43 | 5,99 | -1,37 |

Sumber : Data olahan Jawa Tengah dalam Angka

Dari Tabel 4.18 di atas dapat diketahui bahwa pengeluaran pemerintah menjadi variabel yang paling berpengaruh terhadap PMDN di Jawa Tengah dari tahun 2011-2016 karena pertumbuhan pengeluaran pemerintah lebih besar yaitu sebesar 5,99 persen per tahun sedangkan pertumbuhan ekonomi pertumbuhannya negatif atau turun sebesar 0,43 persen dan suku bunga kredit investasi mengalami pertumbuhan negatif atau turun sebesar 1,37 persen pertahun.

V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Tengah periode tahun 2000-2016, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan suku bunga kredit investasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Tengah.
2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan, tingkat inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan, serta suku bunga kredit investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PMDN di Jawa Tengah.
3. Pengeluaran pemerintah merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap PMDN di Jawa Tengah.

B. Implikasi

Sesuai dengan kesimpulan hasil penelitian terdapat beberapa saran yang dapat digunakan sebagai rekomendasi kebijakan, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu terus berupaya menstabilkan dan meningkatkan perekonomian dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu caranya yaitu dengan menambah dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti listrik, telekomunikasi dan sarana transportasi, berfungsinya sektor moneter, pasar tenaga kerja, dan perpajakan. Sedangkan dari sisi regulasi caranya yaitu dengan pembuatan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek dengan perencanaan yang lebih matang dan pelaksanaan yang baik.
2. Pengeluaran pemerintah yang merupakan faktor paling berpengaruh terhadap PMDN di Jawa Tengah, maka pemerintah perlu meningkatkan lagi alokasinya terutama untuk pembiayaan pembangunan di sektor-sektor yang mempunyai dampak multiplier yang besar terhadap investasi seperti perbaikan dan penambahasan sarana dan prasarana serta perbaikan infrastruktur seperti transportasi, komunikasi dan energi.
3. Pemerintah atau otoritas moneter dapat mengambil kebijakan untuk menjaga kestabilan suku bunga kredit investasi yang kompetitif sehingga investor lebih tertarik menanamkan modalnya di Jawa Tengah dan juga investor dapat mengestimasi keuntungan yang dapat diperoleh di masa yang akan datang

C. Keterbatasan Masalah Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian secara agregat, sehingga hasil yang di dapatkan mungkin kurang sesuai dengan kondisi lapangan yang sebenarnya. Oleh karena itu bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang Penanaman Modal Dalam Negeri bisa menambah variabel lain seperti Produk Domestik Regional Bruto, infrastruktur atau variabel non ekonomi lainnya sebagai variabel independen, sehingga semakin banyak objek yang dapat di diskusikan lagi, semakin menambah pengetahuan dan lebih komprehensif dalam menyarankan kebijakan-kebijakan baru.